



BAB 2

Pertumbuhan Ekonomi

Pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut didukung momentum positif baik dari global maupun domestik. Pertumbuhan ekonomi 2017 meningkat dengan ditopang struktur perekonomian yang membaik serta tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang menurun.

Dinamika perekonomian pada 2017 menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut secara gradual. Momentum dari kondisi global yang lebih kondusif serta stabilitas makroekonomi yang terjaga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017. Pertumbuhan ekonomi global yang cukup solid, baik di negara maju maupun negara berkembang yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, dan kenaikan harga komoditas meningkatkan kinerja ekspor terutama yang berbasis komoditas. Selanjutnya, peningkatan ekspor dan dorongan stimulus fiskal melalui belanja infrastruktur secara perlahan turut meningkatkan keyakinan korporasi untuk melakukan investasi. Korporasi mulai meningkatkan investasi terutama sejak paruh kedua 2017, seiring mulai berkurangnya fase konsolidasi. Namun demikian, perbaikan kinerja ekspor dan investasi sejauh ini belum memberikan daya dorong yang kuat terhadap konsumsi rumah tangga. Secara keseluruhan, perkembangan positif pada ekspor dan investasi berkontribusi besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 yang tercatat 5,07%, lebih baik dari capaian 2016 sebesar 5,03%.

Struktur pemulihan ekonomi Indonesia terutama terjadi pada lapangan usaha (LU) yang terkait dengan ekspor, investasi pemerintah, dan dampak tren pergeseran konsumsi. Dampak perbaikan ekspor terutama tercermin pada subLU perkebunan, sebagian subLU pertambangan, dan sebagian subLU industri pengolahan. Berlanjutnya investasi pemerintah pada berbagai proyek infrastruktur juga mendorong kinerja LU konstruksi. Sementara itu, pergeseran pola konsumsi ke arah *lifestyle* dan *leisure* mendorong kinerja LU penyediaan akomodasi dan makanan-minuman serta LU informasi dan komunikasi. Sebaliknya, beberapa subLU industri pengolahan yang berorientasi domestik serta LU yang terkait jasa masih tumbuh terbatas. Dari sisi spasial, perbaikan ekonomi terutama terjadi di daerah dengan perekonomian berbasis sumber daya alam (SDA) khususnya Kalimantan.

Pemulihan ekonomi yang berlanjut mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pada 2017 menurun. Tingkat pengangguran tercatat menurun, meskipun porsi tenaga kerja informal masih cukup besar. Kemiskinan menurun dipengaruhi oleh inflasi yang rendah termasuk stabilitas harga bahan pokok serta dampak pendapatan yang membaik terbatas. Indikator ketimpangan pada 2017 juga menunjukkan penurunan yang moderat dipengaruhi penurunan pengeluaran pada kelompok 20% teratas.

2.1. PDB SISI PENGELUARAN

Pemulihan perekonomian Indonesia pada 2017 berlanjut gradual didorong perbaikan ekspor dan investasi. Dinamika pertumbuhan ekonomi menunjukkan perekonomian nasional telah melewati titik terendah pertumbuhan ekonomi yakni 4,74% yang terjadi pada pertengahan 2015. Perkembangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi terus membaik secara perlahan sehingga PDB pada 2017 tercatat tumbuh 5,07%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,03% (Tabel 2.1). Dinamika tersebut ditopang pergerakan ekspor dan investasi yang pada 2017 membaik sejalan kondisi global yang kondusif dan stabilitas ekonomi domestik yang terjaga baik. Peran ekspor dan investasi yang menguat juga tergambar pada kontribusi kedua komponen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Dinamika perekonomian menunjukkan perbaikan ekonomi domestik menguat pada paruh kedua 2017. Perkembangan tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin solid, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor secara signifikan hingga mencapai 9,09%. Realisasi pertumbuhan ekspor ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, jauh lebih baik dari capaian pada 2016 yang tercatat kontraksi 1,57%. Selain itu, mulai berkurangnya proses konsolidasi korporasi dan akselerasi pembangunan berbagai proyek infrastruktur memberikan dorongan ke investasi terutama sejak semester II 2017. Investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tercatat tumbuh 6,15%, jauh lebih tinggi dari capaian 2016 (4,47%). Meskipun demikian, perkembangan positif pada ekspor dan investasi tersebut belum cukup kuat meningkatkan konsumsi swasta khususnya konsumsi rumah tangga.

Pemulihan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas mendorong perbaikan ekspor yang signifikan pada 2017. Di satu sisi, perbaikan kinerja ekspor dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia terutama mitra dagang yang cukup solid, termasuk ekonomi AS, Tiongkok, India, dan negara di regional Asia. Ekspor yang meningkat juga didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor. Beberapa harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara, karet, dan minyak sawit mentah meningkat tajam dipengaruhi oleh kenaikan permintaan dan permasalahan berkurangnya pasokan. Perbaikan ekspor turut didukung oleh faktor regulasi

➔ **Tabel 2.1. PDB Sisi Pengeluaran**

Persen, yoy

Komponen PDB	2014	2015	2016	2017				
				I	II	III	IV	Total
Pemintaan Domestik	4,62	4,94	4,39	4,77	4,54	5,54	5,62	5,13
Konsumsi Swasta	5,28	4,84	5,04	5,00	5,02	4,95	4,98	4,98
Konsumsi Rumah Tangga	5,15	4,96	5,01	4,94	4,95	4,93	4,97	4,95
Konsumsi LNPRT	12,19	-0,62	6,64	8,07	8,52	6,02	5,24	6,91
Konsumsi Pemerintah	1,16	5,31	-0,14	2,69	-1,92	3,48	3,81	2,14
PMTB	4,45	5,01	4,47	4,77	5,34	7,08	7,27	6,15
Bangunan	5,52	6,11	5,18	5,87	6,07	6,28	6,68	6,24
Nonbangunan	1,58	1,93	2,43	1,46	3,23	9,47	9,03	5,90
Perubahan Inventori	0,48	-0,59	0,23	0,33	0,02	-1,29	0,24	-0,19
Net Ekspor	0,94	0,94	0,16	0,85	0,55	0,58	-0,57	0,35
Ekspor	1,07	-2,12	-1,57	8,41	2,80	17,01	8,50	9,09
Impor	2,12	-6,25	-2,45	4,81	0,20	15,46	11,81	8,06
Produk Domestik Bruto	5,01	4,88	5,03	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07

Sumber: BPS

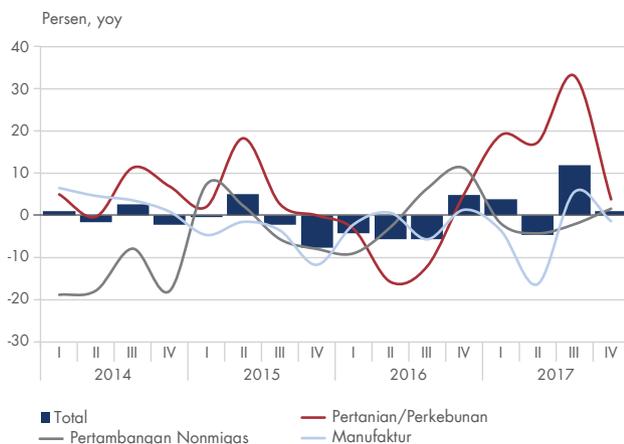
pemerintah dengan adanya relaksasi kuota ekspor komoditas mineral logam.

Secara keseluruhan, perbaikan ekspor masih banyak bertumpu pada ekspor berbasis komoditas. Pertumbuhan ekspor riil SDA nonmigas mencapai sebesar 8,4%, jauh lebih tinggi daripada kondisi 2016 yang mencatat kontraksi 3,7%. Peningkatan ekspor riil tertinggi tercatat pada komoditas perkebunan (Grafik 2.1). Peningkatan ekspor produk perkebunan baik mentah maupun olahan mencapai 17%, terutama karena dorongan kenaikan

ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan karet. Ekspor riil CPO tercatat tumbuh 8,2%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2016 yang tercatat 0,4%. Peningkatan ekspor CPO dipengaruhi oleh tingginya permintaan, termasuk dari India dan Tiongkok, serta kenaikan harga yang mencapai 5,2%. Ekspor riil karet juga tumbuh tinggi hingga mencapai 22,8%, didukung oleh kenaikan harga yang mencapai 6,2%.

Ekspor komoditas pertambangan nonmigas juga berkontribusi pada kenaikan ekspor. Ekspor riil batu bara, yang memiliki pangsa sekitar 67% dari total ekspor komoditas pertambangan nonmigas, tumbuh sebesar 2,4%, jauh lebih baik dari kondisi tahun 2016 yang mencatat kontraksi 0,7%. Ekspor batu bara yang naik dipicu kenaikan harga batu bara yang mencapai 48,2% dan bahkan secara level berada di atas 90 dolar AS per metrik ton pada paruh kedua 2017. Harga tersebut merupakan level harga yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Ekspor bijih logam nonbesi yang utamanya tembaga, nikel, bauksit, dan timah juga menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekspor riil bijih logam nonbesi tercatat sebesar 14,0% pada 2017, tidak berbeda jauh dengan kondisi tahun sebelumnya sebesar 14,5%. Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat bijih logam yang diatur dengan Permen ESDM No. 5 dan 6 tahun 2017 turut berpengaruh pada kinerja ekspor bijih logam

➔ **Grafik 2.1. Ekspor Riil Nonmigas**



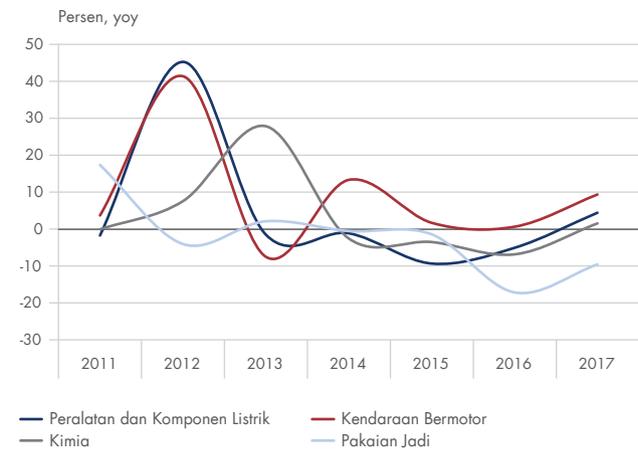
Sumber: Bank Indonesia

nonbesi yang tetap positif.¹ Hal berbeda diperlihatkan ekspor logam besi yang mencatatkan kontraksi sangat dalam hingga sebesar 26,2%, seiring dengan tingginya kebutuhan domestik untuk berbagai proyek infrastruktur. Namun, perkembangan positif ekspor komoditas pertambangan tertahan oleh penurunan ekspor migas sebagai pengaruh dari rendahnya realisasi *lifting*.

Berbeda dengan ekspor berbasis SDA, kinerja ekspor manufaktur terlihat belum segera dapat memanfaatkan momentum perbaikan kondisi global. Ekspor riil manufaktur masih tercatat kontraksi sebesar 4,2%, terutama bersumber dari perlambatan ekspor produk tekstil, mesin dan peralatan, serta produk kayu. Ekspor pakaian jadi juga masih tercatat kontraksi, meskipun sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya seiring dengan membaiknya permintaan dari negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Di tengah kinerja beberapa produk manufaktur yang masih mengalami penurunan, kinerja ekspor produk kimia organik, kendaraan bermotor, dan peralatan listrik menunjukkan perbaikan yang masing-masing tumbuh sebesar 16,8%, 9,4% dan 4,5% (Grafik 2.2). Peningkatan ekspor produk kimia organik dipengaruhi oleh membaiknya kegiatan industri di Tiongkok. Sementara itu, ekspor kendaraan bermotor masih didominasi oleh pasar tujuan ekspor di Asia Tenggara, khususnya untuk jenis *low cost green car* (LCGC). Ekspor produk peralatan listrik juga diuntungkan dengan perbaikan permintaan dari sejumlah negara di Asia Tenggara, Jepang, dan Amerika Serikat.

Selain ekspor, investasi menjadi sumber pemulihan ekonomi pada 2017. Penanaman modal tetap domestik bruto (PMTB) pada 2017 tumbuh 6,15%, meningkat dibandingkan dengan capaian 2016 sebesar 4,47% (Tabel 2.1). Peningkatan tersebut bersumber dari seluruh komponen investasi, baik investasi bangunan maupun investasi nonbangunan. Secara fundamental, perbaikan investasi yang lebih positif tercermin dari kembali meningkatnya rasio investasi terhadap PDB, setelah berada dalam tren menurun pasca berakhirnya *boom* komoditas SDA. Di satu sisi, perkembangan positif investasi didorong oleh akselerasi pembangunan proyek infrastruktur yang pada gilirannya meningkatkan investasi

➔ **Grafik 2.2. Perkembangan Ekspor Riil Manufaktur**

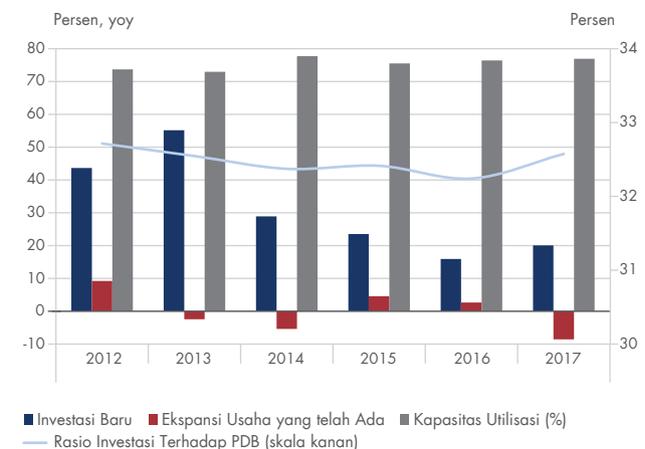


Sumber: Bank Indonesia

bangunan. Di sisi lain, kenaikan ekspor terutama sektor berbasis komoditas dan keyakinan korporasi yang mulai membaik berkontribusi pada kenaikan investasi, termasuk investasi nonbangunan.

Investasi baru tumbuh lebih baik dibandingkan dengan ekspansi usaha yang telah ada. Di satu sisi, investasi baru tumbuh signifikan sebesar 20,1%, didukung proyek infrastruktur konektivitas dan kelistrikan (Grafik 2.3). Investasi baru juga turut didukung oleh investasi di sektor jasa khususnya jasa berbasis teknologi. Perkembangan teknologi dan ekonomi digital mendorong kemajuan bisnis *online* serta jasa penyediaan infrastruktur pendukung. Akselerasi investasi di usaha jasa berbasis teknologi tercermin dari *merger* dan akuisisi yang dilakukan pada 2017. Jumlah akuisisi yang mayoritas

➔ **Grafik 2.3. Jenis Investasi dan Kapasitas Utilisasi**



Sumber: BKPM, diolah

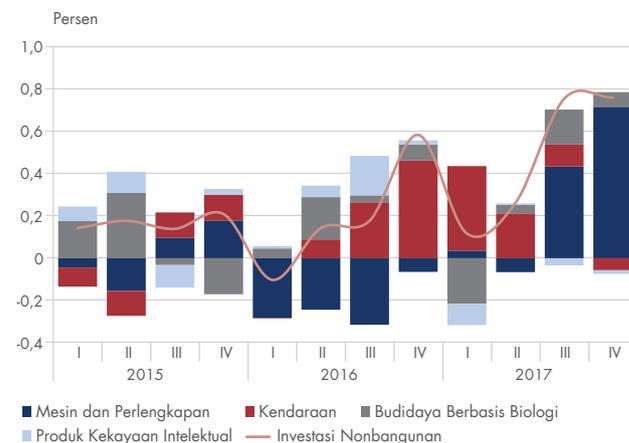
¹ Perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat yang belum diolah dan dimurnikan, diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 5 tahun sejak Januari 2017, dengan syarat dilakukan perubahan bentuk pengusahaan tambang dari Kontrak Karya ke IUPK serta komitmen dalam pembangunan *smelter*.

bersumber dari investasi asing hingga triwulan III 2017 meningkat 5,4%. Di sisi lain, investasi dari ekspansi usaha yang telah ada (*existing*) masih mengalami kontraksi pada 2017. Hal ini turut dipengaruhi oleh kapasitas utilisasi yang masih berada di bawah 80%. Sejumlah korporasi di industri manufaktur terindikasi melakukan investasi terbatas pada perawatan dan penggantian alat produksi.

Investasi bangunan, yang memiliki pangsa lebih dari 70% terhadap total investasi, tumbuh dengan dukungan pembangunan proyek infrastruktur. Pertumbuhan investasi bangunan tercatat sebesar 6,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,2%. Akselerasi proyek infrastruktur antara lain tercermin dari perkembangan kemajuan proyek-proyek pembangkit listrik di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat serta penyelesaian berbagai ruas jalan tol. Pendanaan investasi proyek infrastruktur tersebut tidak hanya bersumber dari Pemerintah, namun juga dari swasta khususnya BUMN yang justru lebih dominan. Selain itu, investasi bangunan juga ditopang oleh proyek pembangunan properti swasta, khususnya jenis properti hunian. Berbagai peningkatan investasi bangunan berdampak pada pertumbuhan konsumsi semen yang cukup tinggi yakni 6,2% pada 2017, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2016 yakni 2,3%.

Investasi nonbangunan juga meningkat, didorong oleh dampak kenaikan ekspor terutama berbasis komoditas dan akselerasi pembangunan infrastruktur energi. Investasi nonbangunan pada 2017 tumbuh 5,9%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 2016 sebesar 2,4%. Peningkatan investasi oleh korporasi di sektor perkebunan dan pertambangan telah dimulai semenjak awal 2017. Sebagian besar investasi di sektor primer terutama terkait dengan kebutuhan untuk meremajakan alat angkut guna mendukung operasional usaha perkebunan dan pertambangan. Kondisi ini kemudian mendorong besarnya komponen investasi kendaraan pada investasi nonbangunan (Grafik 2.4). Memasuki paruh kedua 2017, peningkatan investasi nonbangunan semakin terakselerasi terutama pada komponen mesin dan peralatan. Perkembangan ini tidak terlepas dari proyek kelistrikan, sejalan dengan fase penyelesaian pembangunan pembangkit yang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW. Perkembangan positif investasi nonbangunan juga

➔ **Grafik 2.4.** Kontribusi Pertumbuhan Investasi Nonbangunan terhadap PDB



Sumber: BPS, diolah

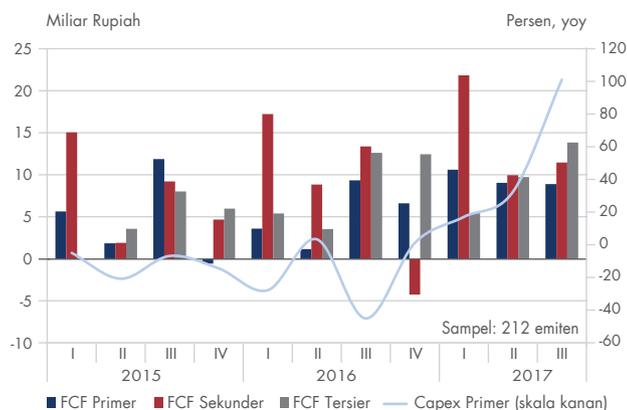
bersumber dari investasi infrastruktur pendukung terkait perkembangan ekonomi digital.

Hal berbeda terlihat pada investasi nonbangunan industri pengolahan yang masih belum sekuat pada investasi nonbangunan sektor primer. Hal ini terkait dengan kapasitas utilisasi industri pengolahan yang masih di level moderat. Selain itu, sebagian korporasi juga masih melanjutkan konsolidasi internal dalam rangka memperkuat kondisi keuangan serta meningkatkan kapasitas pembiayaan ke depan. Beberapa investasi pada industri pengolahan ditujukan antara lain untuk perawatan mesin dan peralatan serta penggantian suku cadang guna menjaga produktivitas. Investasi mesin baru terkait proses otomasi juga dilakukan di sejumlah industri untuk mendukung efisiensi.

Peningkatan investasi terutama pada paruh kedua 2017 juga didukung oleh kinerja keuangan korporasi yang lebih baik pascakonsolidasi internal. Selain kenaikan pendapatan, berbagai langkah efisiensi yang ditempuh korporasi membuahkan hasil pada kinerja keuangan yang lebih solid. Hal ini tercermin pada peningkatan *free cash flow* (FCF) yang dapat digunakan untuk pembiayaan investasi.² Pada 2017, perbaikan FCF paling signifikan terlihat pada emiten sektor primer yang mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya, meski secara nominal lebih kecil dari FCF emiten sektor sekunder maupun tersier (Grafik 2.5). Kenaikan FCF yang tinggi pada sektor primer kemudian mendukung kenaikan

2 *Free cash flow* (FCF) merupakan ukuran kemampuan *cash* perusahaan setelah memperhitungkan *capital expenditure*. FCF antara lain dapat digunakan untuk ekspansi usaha, dividen, dan mengurangi hutang.

➔ Grafik 2.5. Free Cash Flow Emiten Multisektor



Sumber: Bloomberg, diolah

Keterangan: Primer: Pertanian, Pertambangan; Sekunder: Industri Dasar, Industri Barang Konsumen, Industri Lainnya; Tersier: Properti, Infrastruktur, Perdagangan

belanja modal yang cukup signifikan. Sementara itu, belanja modal emiten di sektor sekunder dan tersier juga membaik dan kembali tumbuh positif, setelah mengalami kontraksi dalam periode sebelumnya.

Peningkatan investasi korporasi juga didukung oleh perbaikan keyakinan seiring dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga dan iklim usaha yang lebih kondusif. Konsistensi kebijakan dalam mengawal stabilitas makroekonomi mendukung kenaikan peringkat utang menjadi layak investasi dari Standard & Poor's pada Mei 2017, melengkapi predikat layak investasi yang telah diberikan oleh Moody's dan Fitch. Selain itu, iklim usaha yang membaik juga terlihat dari perbaikan peringkat daya saing dari World Economic Forum (WEF) serta survei kemudahan usaha dari Bank Dunia.³ Capaian ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah, termasuk melalui deregulasi yang diterbitkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I-XVI. Perkembangan positif tersebut mendukung pembiayaan investasi melalui masuknya aliran dana modal asing.

Proses pemulihan ekonomi yang terus berlanjut pada 2017 didukung oleh masih besarnya peran stimulus pemerintah. Hal ini tergambar pada belanja pemerintah yang lebih kuat pada paruh kedua 2017 pasca pengesahan APBNP 2017. Selain stimulus melalui investasi berbagai proyek infrastruktur, pemerintah juga memberikan stimulus ke perekonomian melalui konsumsi.

Konsumsi pemerintah 2017 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,14%, setelah mengalami kontraksi sebesar 0,14% pada 2016. Selain melalui peningkatan belanja barang dan jasa, stimulus ke perekonomian juga diberikan melalui belanja pegawai dengan penyaluran gaji ke-14 seperti halnya pada 2016. Stimulus fiskal juga diberikan melalui peningkatan program bantuan sosial (Bansos) serta perluasan program keluarga harapan (PKH) terutama pada paruh kedua 2017.

Percepatan pemulihan ekonomi 2017 menjadi belum optimal karena konsumsi rumah tangga masih tumbuh terbatas. Konsumsi rumah tangga yang memiliki pangsa terbesar yakni sekitar 54% terhadap PDB tumbuh sebesar 4,95%, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2016 yang tercatat 5,01%. Konsumsi rumah tangga yang masih terbatas tersebut menyebabkan perlambatan konsumsi swasta secara keseluruhan. Meskipun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2017 masih lebih baik daripada 2015 di saat perekonomian berada di titik terendah pascaboom komoditas. Fenomena pelemahan konsumsi rumah tangga ini juga dialami sejumlah negara pengekspor SDA setelah berakhirnya boom komoditas SDA. Tertahannya efek *trickle down* dari penerimaan ekspor komoditas ke perekonomian terutama terlihat pada struktur perekonomian yang belum terdiversifikasi.⁴

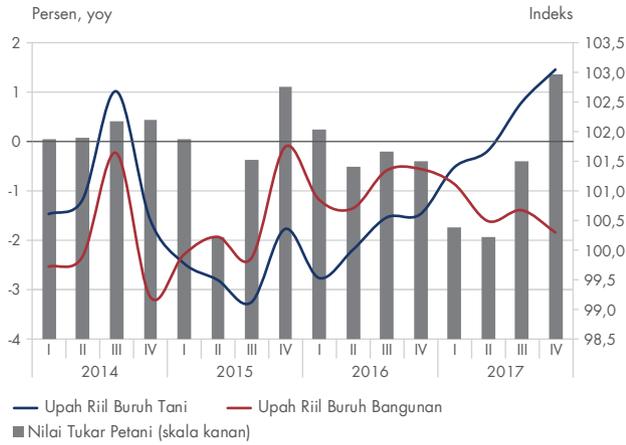
Beberapa faktor memengaruhi belum optimalnya peran konsumsi rumah tangga dalam mempercepat pemulihan ekonomi 2017. Satu faktor yang memengaruhi belum kuatnya konsumsi rumah tangga ialah dampak dari kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) pada 2017. Kebijakan ini ditempuh sebagai kelanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah dalam mendukung strategi belanja yang lebih berkualitas dan sekaligus menjaga prospek kesinambungan fiskal. Namun demikian, perkembangan 2017 menunjukkan kebijakan ini dalam jangka pendek memengaruhi konsumsi rumah tangga terutama pada kelompok pendapatan bawah.

Konsumsi rumah tangga yang belum kuat juga dipengaruhi oleh penyesuaian perilaku konsumsi masyarakat terhadap dinamika pendapatan (Lihat Boks 2.1. Konsumsi Rumah Tangga dan Dinamika Pendapatan). Dinamika pendapatan masyarakat kelompok menengah bawah menunjukkan perkembangan

³ Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia pada survei *Ease of Doing Business* Bank Dunia membaik ke peringkat 72 dari 91. Sementara peringkat Indonesia pada survei *Global Competitiveness Index* meningkat ke posisi 36 dari 41.

⁴ Lag dampak dari peningkatan ekspor ke perekonomian domestik cenderung lebih panjang pada fase pemulihan dibandingkan fase ekspansi, terkait dengan konsolidasi yang masih dilakukan korporasi pada awal fase pemulihan ekonomi.

➔ **Grafik 2.6.** Upah Riil Buruh Tani dan Bangunan

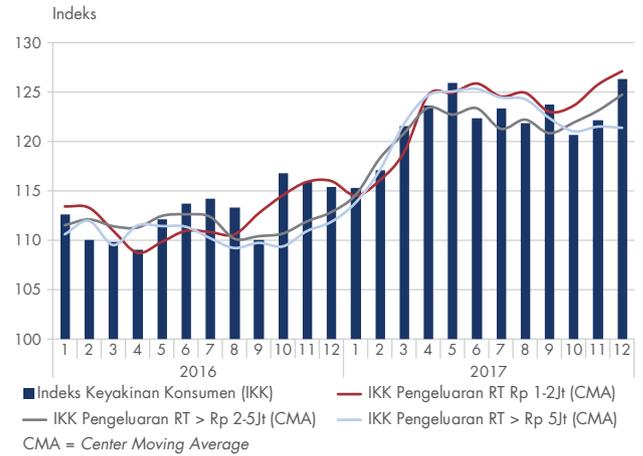


Sumber: BPS, diolah

upah riil buruh bangunan dan upah riil buruh tani yang belum menunjukkan perbaikan yang kuat (Grafik 2.6). Upah riil buruh tani tumbuh terkontraksi hingga paruh pertama 2017, sebelum kemudian membaik pada semester II 2017. Sementara itu, pertumbuhan upah riil buruh bangunan masih terkontraksi pada 2017. Hal ini turut dipengaruhi meningkatnya mekanisasi pada sebagian proyek konstruksi. Upah buruh di beberapa sektor informal lainnya juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Selain itu, tenaga kerja dengan pendapatan yang berfluktuasi cenderung meningkat, sehingga memberikan dampak pada kerentanan konsumsi rumah tangga. Perkembangan ini pada gilirannya memengaruhi daya beli masyarakat kelompok menengah bawah dan menahan kenaikan konsumsi rumah tangga.

Penyesuaian konsumsi terhadap dinamika pendapatan terlihat berbeda pada kelompok menengah atas. Hal ini terkait dengan tingkat keyakinan rumah tangga kelompok menengah sehingga berpengaruh terhadap konsumsi. Secara umum, keyakinan konsumen pada 2017 lebih baik dengan adanya optimisme terhadap prospek perbaikan ekonomi pada awal tahun (Grafik 2.7). Namun demikian, keyakinan konsumen khususnya konsumen dengan pengeluaran lebih dari Rp5 juta per bulan cenderung melemah pada paruh kedua 2017. Perkembangan tersebut pada gilirannya membuat konsumsi pada kelompok tersebut berubah, yakni dengan lebih menunda konsumsi dan mengalihkan pendapatan pada simpanan di perbankan. Hal ini terindikasi dari data simpanan rumah tangga yang meningkat, khususnya untuk rumah tangga dengan simpanan di

➔ **Grafik 2.7.** Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia

Keterangan: Angka 100 adalah ambang batas level optimis konsumen.

atas Rp2 miliar.⁵ Perkembangan ini pada gilirannya berkontribusi menahan kenaikan konsumsi rumah tangga.

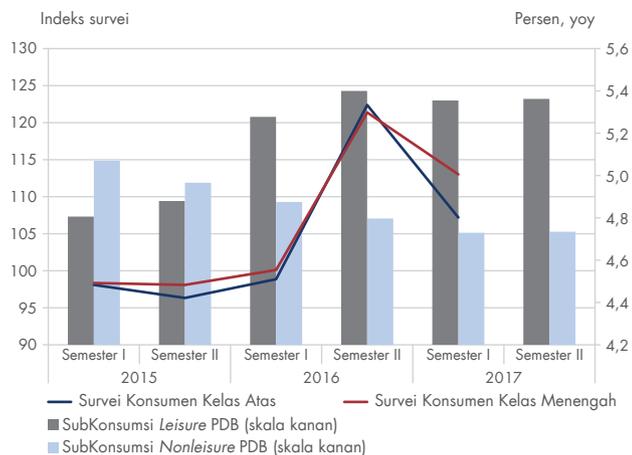
Konsumsi rumah tangga juga menjadi tidak optimal karena saat bersamaan terindikasi terjadi perubahan perilaku dan preferensi konsumen yang kemudian memengaruhi pola konsumsi. Perubahan perilaku konsumen ditandai dengan konsumsi yang lebih rasional dan selektif serta pergeseran preferensi konsumsi ke arah *leisure* dan *lifestyle*. Pergeseran pola konsumsi tersebut terindikasi telah berlangsung dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh perkembangan akses teknologi serta peningkatan daya beli terhadap jenis belanja yang bersifat *leisure* dan *lifestyle* (Grafik 2.8).⁶ Perkembangan ini antara lain dipengaruhi transisi demografi Indonesia yang semakin didominasi generasi produktif usia muda serta perkembangan kelas menengah di era ekonomi digital.

Perubahan pola konsumsi kelas menengah atas tercermin dari tren jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Dalam tiga tahun terakhir, tren pembelian pakaian dan makanan minuman selain restoran terus melambat, meskipun secara riil masih tumbuh masing-masing sebesar 2,9% dan 5,2% (Grafik 2.9). Di sisi lain, belanja terkait dengan *lifestyle* dan *leisure* seperti restoran, hotel, serta transportasi dan

5 Pada semester I 2017, total simpanan rumah tangga meningkat 10,8%, sementara simpanan rumah tangga di atas Rp2 miliar tumbuh 14,1% dibandingkan periode yang sama pada 2016.

6 Konsumsi bersifat *leisure* mengalami perlambatan sangat dalam *pascaboom* komoditas dan baru pulih seiring dengan terlewatnya titik terendah (*trough*) perekonomian pada 2015. Pertumbuhan konsumsi bersifat *leisure* yang signifikan turut didukung oleh peningkatan konektivitas dan perkembangan sektor pariwisata.

➔ **Grafik 2.8. Konsumsi Leisure vs Nonleisure⁷**



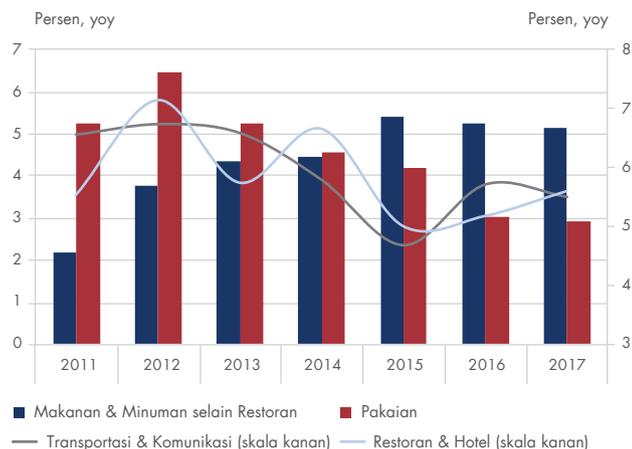
Sumber: BPS dan Survei Konsumen Nielsen Indonesia, diolah

komunikasi dalam tren meningkat hingga masing-masing tumbuh sebesar 5,6% dan 5,2% pada 2017.

Di tengah masih tertahannya konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh lebih baik. LNPRT, yang mempunyai porsi 2% terhadap konsumsi swasta, tercatat tumbuh mencapai 6,91%. Pertumbuhan LNPRT tercatat cukup tinggi pada paruh pertama 2017 terkait dengan peningkatan aktivitas penyelenggaraan pilkada serentak di 101 wilayah.

Peningkatan ekspor dan permintaan domestik untuk investasi dan konsumsi pada gilirannya memicu

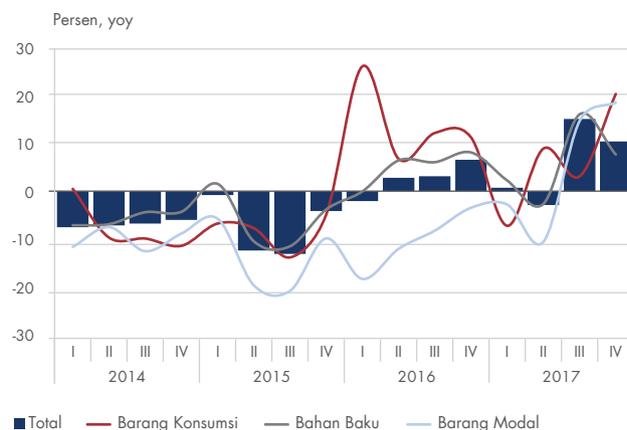
➔ **Grafik 2.9. Jenis Konsumsi Rumah Tangga**



Sumber: BPS, diolah

⁷ Konsumsi *leisure* mencakup konsumsi untuk transportasi dan komunikasi serta hotel dan restoran. Konsumsi *nonleisure* meliputi konsumsi makanan dan minuman nonrestoran seperti pendidikan dan kesehatan, perumahan, peralatan rumah tangga, dan lainnya.

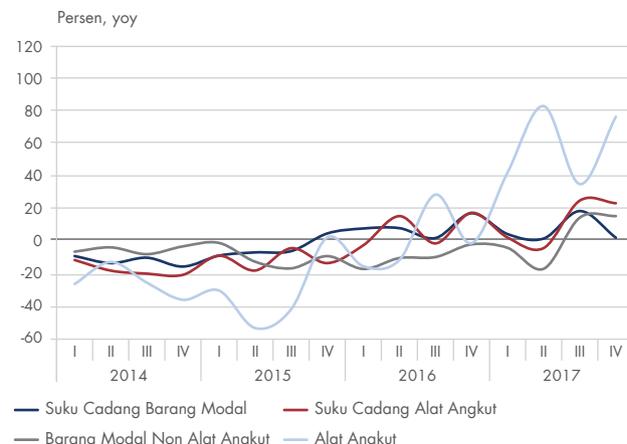
➔ **Grafik 2.10. Impor Riil Berdasarkan Jenis**



Sumber: Bank Indonesia

peningkatan impor. Keseluruhan impor pada 2017 tumbuh 8,06%, meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,45%. Sejalan dengan ekspor yang meningkat, pertumbuhan impor bahan baku juga naik signifikan. Impor riil bahan baku tumbuh 5,5% pada 2017, lebih tinggi dari kondisi tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,1% (Grafik 2.10). Selain impor bahan baku untuk mendukung proses produksi, impor barang modal juga meningkat hingga 4,0%, dibandingkan dengan realisasi pada 2016 yang berkontraksi 10,8%. Peningkatan tersebut terutama dipicu oleh kenaikan investasi, terutama mesin dan perlengkapan serta kendaraan sebagaimana tercermin pada peningkatan impor suku cadang dan alat angkut (Grafik 2.11). Impor barang konsumsi juga terlihat meningkat terutama pada semester II 2017.

➔ **Grafik 2.11. Impor Suku Cadang dan Alat Angkut**



Sumber: BPS, diolah

2.2. PDB SISI LAPANGAN USAHA

Perbaikan di sisi lapangan usaha memperlihatkan besarnya peran ekspor berbasis SDA, pembangunan infrastruktur, dan pergeseran preferensi konsumsi rumah tangga. Perbaikan ekonomi terlihat pada LU pertanian, kehutanan dan perikanan serta sebagian subLU pertambangan dan penggalian, khususnya terkait batu bara, sejalan dengan meningkatnya kinerja ekspor. Selain itu, perbaikan kinerja juga terjadi di LU konstruksi sejalan dengan akselerasi proyek infrastruktur. Perbaikan ekonomi juga ditopang oleh LU penyediaan akomodasi dan makanan minuman, LU transportasi dan pergudangan, serta LU informasi dan komunikasi seiring dengan pergeseran preferensi konsumsi rumah tangga ke arah *lifestyle* dan *leisure*. Sementara itu, LU jasa keuangan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya tumbuh melambat (Tabel 2.2).

Lebih rinci, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh meningkat didorong kuatnya produksi di subLU perkebunan dan perikanan. Kontribusi pertumbuhan dari kedua subLU mencapai hampir dari setengah kontribusi pertumbuhan LU pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan subLU perkebunan tercatat 4,46% pada 2017, lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,47%. Sementara itu, subLU perikanan tumbuh 5,95% naik dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 5,15% pada 2016.

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan produksi perkebunan maupun hasil perikanan ialah cuaca yang lebih baik pascagangguan iklim La Nina yang terjadi pada 2016. Insiden kebakaran lahan perkebunan juga lebih minimal pada 2017 karena didukung pengawasan yang lebih baik. Meskipun demikian, perluasan lahan perkebunan terbatas dengan adanya perpanjangan moratorium ijin baru lahan sawit di kawasan hutan primer dan gambut. Kenaikan ekspor dan harga komoditas

➔ **Tabel 2.2.** PDB Sisi Lapangan Usaha

Persen, yoy

Komponen PDB	2013	2014	2015	2016	2017				
					I	II	III	IV	Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,20	4,24	3,75	3,36	7,15	3,23	2,77	2,24	3,81
Pertambangan dan Penggalian	2,53	0,43	-3,42	0,95	-1,22	2,12	1,84	0,08	0,69
Industri Pengolahan	4,37	4,64	4,33	4,26	4,28	3,50	4,85	4,46	4,27
Pengadaan Listrik	5,23	5,90	0,90	5,39	1,60	-2,53	4,88	2,27	1,54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,32	5,24	7,07	3,60	4,39	3,67	4,82	5,53	4,61
Konstruksi	6,11	6,97	6,36	5,22	5,96	6,94	6,98	7,23	6,79
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	4,81	5,18	2,54	4,03	4,61	3,47	5,20	4,47	4,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,97	7,36	6,71	7,45	8,06	8,80	8,88	8,21	8,49
Transportasi dan Pergudangan	6,80	5,77	4,31	5,17	5,27	5,73	5,69	5,49	5,55
Informasi dan Komunikasi	10,39	10,12	9,70	8,88	10,48	11,06	8,82	8,99	9,81
Jasa Keuangan	8,76	4,68	8,58	8,90	5,99	5,94	6,16	3,85	5,48
Real Estate	6,54	5,00	4,11	4,69	3,66	3,73	3,60	3,73	3,68
Jasa Perusahaan	7,91	9,81	7,69	7,36	6,83	8,24	9,37	9,25	8,44
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,56	2,38	4,63	3,19	0,23	-0,03	0,69	6,95	2,06
Jasa Pendidikan	7,44	5,47	7,33	3,80	4,05	0,88	3,62	5,89	3,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	7,96	7,96	6,69	5,15	7,06	6,32	7,51	6,31	6,79
Jasa Lainnya	6,40	8,93	8,08	8,02	7,90	8,51	9,31	8,87	8,66
Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk	21,80	5,08	32,55	19,20	9,42	24,42	7,06	14,03	13,38
Produk Domestik Bruto	5,56	5,01	4,88	5,03	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07

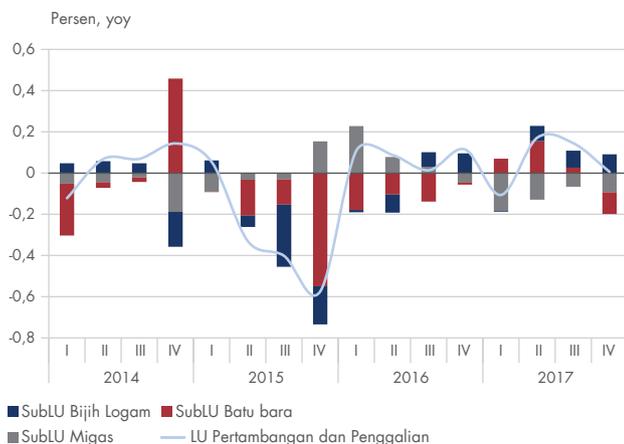
Sumber: BPS

perkebunan khususnya CPO berdampak positif bagi produsen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Selain itu, kontribusi subLU perikanan juga meningkat dipengaruhi kenaikan hasil seiring penambahan kapal nelayan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kinerja LU pertambangan dan penggalian masih tumbuh positif didukung oleh perbaikan harga komoditas dan kenaikan permintaan mitra dagang. Pertumbuhan lapangan usaha ini terutama ditopang oleh subLU batu bara dan bijih logam (Grafik 2.12). Kinerja subLU batu bara yang membaik dipengaruhi oleh kenaikan harga batu bara dan peningkatan permintaan dari Tiongkok, yang merupakan pasar tujuan utama ekspor batu bara Indonesia, serta tujuan negara ASEAN lainnya untuk keperluan pembangkit listrik (Grafik 2.13). Sementara itu, peningkatan kinerja ekspor bijih logam terutama terlihat pada bijih nikel dan tembaga ke pasar tujuan Jepang dan Tiongkok. Relaksasi kuota ekspor bijih logam turut mendukung perbaikan kinerja subLU tersebut. Potensi perbaikan kinerja LU pertambangan lebih lanjut tertahan oleh pertumbuhan subLU migas yang masih mencatat kontraksi. Hal ini merupakan dampak dari penurunan *lifting* minyak sebesar 3,1%, meskipun telah ditopang oleh produksi kilang minyak Cepu yang beroperasi secara optimal pada awal 2016.

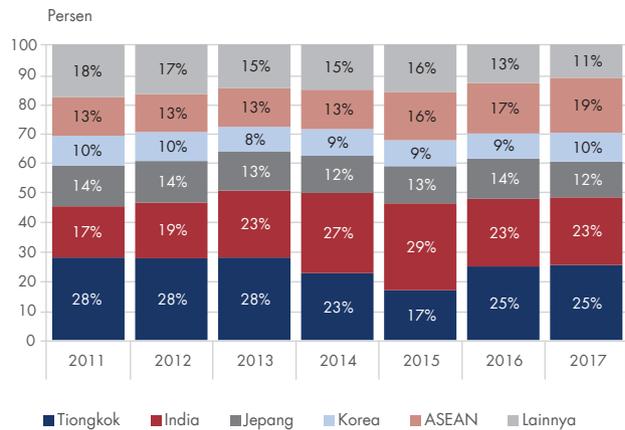
Kinerja LU industri pengolahan 2017 secara umum membaik, meskipun masih belum kuat dan kurang merata. LU industri pengolahan tumbuh stabil sebesar 4,27% pada 2017. Perbaikan kinerja terutama terlihat pada industri yang berorientasi ekspor. Sementara, perbaikan pada

➔ **Grafik 2.12. Kontribusi Pertumbuhan PDB dari LU Pertambangan**



Sumber: BPS, diolah

➔ **Grafik 2.13. Ekspor Batu Bara Menurut Negara Tujuan**

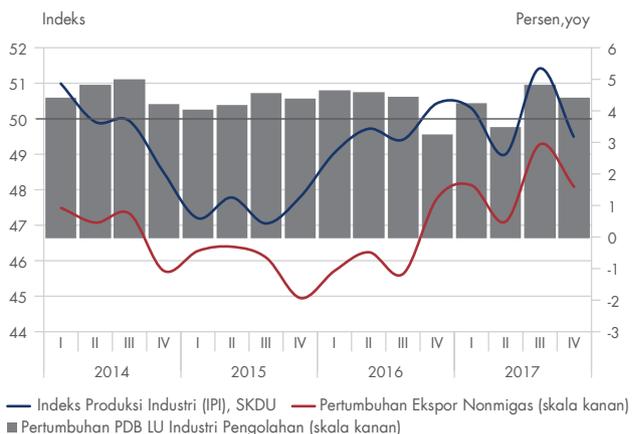


Sumber: Bank Indonesia

industri pengolahan yang berorientasi domestik masih belum merata, sejalan dengan terbatasnya konsumsi domestik. Dari 11 subLU industri pengolahan berorientasi domestik, hanya kinerja subLU industri makanan dan minuman yang mengalami peningkatan.⁸

Lebih rinci di LU industri pengolahan, permintaan eksternal mampu menopang kinerja industri dengan orientasi ekspor, terutama di industri karet, tekstil dan pakaian jadi, logam dasar, serta mesin dan perlengkapan listrik. Hal ini tercermin dari pergerakan pertumbuhan ekspor nonmigas dan indeks produksi industri pengolahan (Grafik 2.14). Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mencatatkan pertumbuhan paling signifikan didorong

➔ **Grafik 2.14. Indeks Produksi Industri dan Ekspor Nonmigas**



Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

Keterangan: Indeks Produksi Industri di atas 50 menunjukkan ekspansi

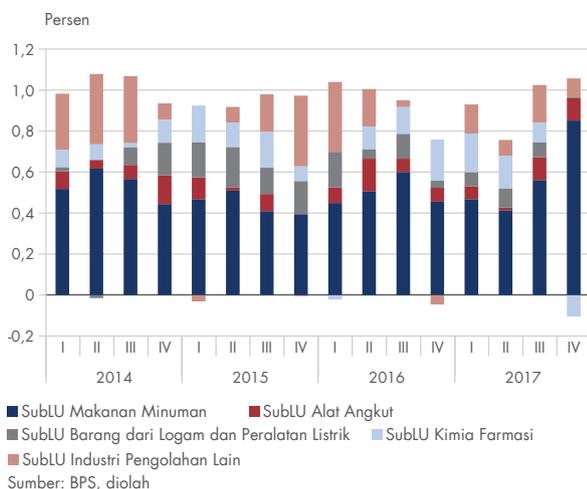
8 Klasifikasi orientasi ekspor atau domestik berdasarkan pendekatan dengan mengacu tabel Input-Output (I/O) 2010.

oleh meningkatnya permintaan dari negara maju. Perbaikan kinerja TPT juga didukung kebijakan yang lebih kondusif pada industri padat karya. Sementara itu, perbaikan kinerja industri logam didorong oleh ekspor dan akselerasi pembangunan proyek infrastruktur.

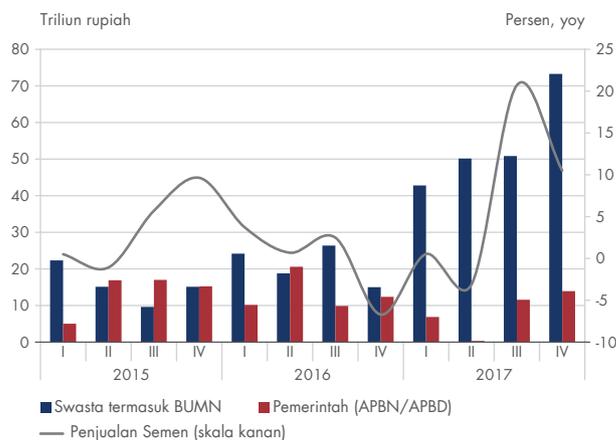
Berdasarkan kontribusi pertumbuhan, industri makanan dan minuman tercatat meningkat dan memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pertumbuhan LU industri pengolahan. Kontribusi pertumbuhan terbesar berikutnya pada industri kimia, alat angkut, barang dari logam, dan peralatan listrik termasuk elektronik dan komputer, meskipun kinerja beberapa subLU tersebut mencatatkan penurunan (Grafik 2.15).

Kinerja LU konstruksi juga meningkat tinggi, terutama didorong dampak positif akselerasi pembangunan proyek infrastruktur. Pertumbuhan LU konstruksi tercatat 6,79%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,22%. Sebagian besar proyek infrastruktur merupakan proyek swasta termasuk BUMN, baik di transportasi maupun kelistrikan (Grafik 2.16). Hingga triwulan III 2017, tercatat 8 proyek pembangkit listrik berkapasitas sekitar 500 MW diselesaikan di Bangka Belitung, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan NTB. Akselerasi proyek infrastruktur juga terlihat dari penyelesaian pembangunan jalan tol sepanjang kurang lebih 380 km, melampaui capaian pembangunan jalan tol pada 2016 yang hanya sekitar separuhnya. Sementara itu, proyek komersial swasta secara umum terindikasi masih terbatas. Beberapa jenis proyek konstruksi swasta yang kembali meningkat baru tercatat pada pembangunan proyek hunian.

➔ **Grafik 2.15. Kontribusi Pertumbuhan PDB dari LU Industri Pengolahan**



➔ **Grafik 2.16. Proyek Pembangunan Konstruksi**



Sumber: BCI, diolah

Kinerja LU perdagangan besar dan eceran juga meningkat terutama ditopang oleh perbaikan aktivitas ekspor. Peningkatan aktivitas ekspor mendukung intermediasi kegiatan perdagangan besar. Hal ini tercermin dari pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran yang lebih kuat khususnya pada semester II 2017. LU perdagangan besar dan eceran, yang memiliki pangsa terbesar kedua setelah LU industri pengolahan, tumbuh 4,44% atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,03%. Sementara itu, konsumsi domestik yang masih terbatas menyebabkan kinerja perdagangan eceran juga belum kuat. Indeks penjualan eceran tercatat hanya tumbuh 3,1%, jauh lebih lambat daripada pertumbuhan tahun sebelumnya yang masih mencapai 11,0% (Grafik 2.17). Tekanan penjualan terindikasi di segmen *hypermarket*

➔ **Grafik 2.17. Penjualan Eceran dan Penjualan Kendaraan Bermotor**



Sumber: Bank Indonesia dan CEIC, diolah

dan *department store*, sementara penurunan penjualan di minimarket lebih terbatas. Peralihan dari perdagangan *offline* ke *online* menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha perdagangan ritel.

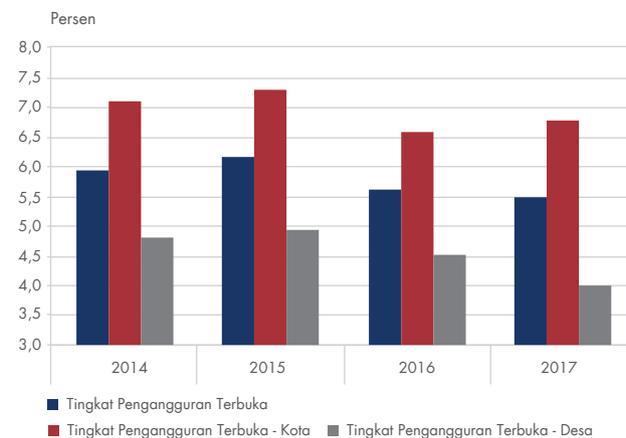
Beberapa LU yang terkait dengan perubahan preferensi konsumsi masyarakat seperti LU akomodasi dan makanan dan minuman, LU informasi dan komunikasi, serta LU transportasi dan pergudangan juga meningkat. Perbaikan kinerja LU penyediaan akomodasi dan makan minum didukung oleh perkembangan sektor pariwisata seiring perubahan preferensi konsumsi masyarakat kelas menengah atas ke arah *leisure* dan *lifestyle*. Perkembangan ekonomi digital juga turut berdampak positif terhadap kinerja LU informasi dan komunikasi serta LU transportasi dan pergudangan. LU informasi dan komunikasi bahkan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pesatnya bisnis *online* mendorong penggunaan data internet. Perkembangan bisnis *online* juga mendorong kinerja jasa periklanan serta jasa transportasi pengiriman barang dan pengantaran penumpang, serta jasa logistik dan pergudangan.

Terakhir, kinerja LU jasa keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan menurun tajam pada 2017. Pelemahan terutama terjadi pada subLU jasa perantara keuangan khususnya jasa perbankan, sejalan dengan intermediasi perbankan yang belum optimal. Penurunan kontribusi pertumbuhan subLU jasa perantara keuangan merupakan yang tertinggi dari seluruh sektor jasa pada 2017. SubLU jasa *real estate* dan subLU jasa perusahaan juga masih turun seiring pemulihan ekonomi yang masih terbatas.

2.3. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Pemulihan ekonomi yang terus berlangsung mendorong perbaikan dari sisi ketenagakerjaan. Beberapa indikator menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang membaik, meskipun masih terbatas. Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,5% pada Agustus 2017 atau sedikit menurun dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2016 yang tercatat sebesar 5,6% (Grafik 2.18). Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat yakni dari 66,3% menjadi 66,7% pada 2017. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga tercermin pada indikator *job vacancy online* yang meningkat secara

➔ **Grafik 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka**



Sumber: BPS, diolah
Keterangan: Data posisi Agustus pada masing-masing periode

moderat, baik dari pertumbuhan lowongan kerja maupun rata-rata penawaran kerja setiap bulannya (Grafik 2.19).⁹

Berdasarkan sektor, perbaikan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor *nontradable* (Grafik 2.20). Peningkatan serapan tenaga kerja tertinggi terjadi di LU perdagangan dan LU penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, sejalan dengan perkembangan aktivitas ekspor maupun industri pariwisata. Perbaikan penyerapan tenaga kerja terutama untuk tingkat pendidikan menengah ke bawah sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SMA/SMK. Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja di LU pertanian, kehutanan, dan perikanan serta LU pertambangan dan penggalian justru menurun.

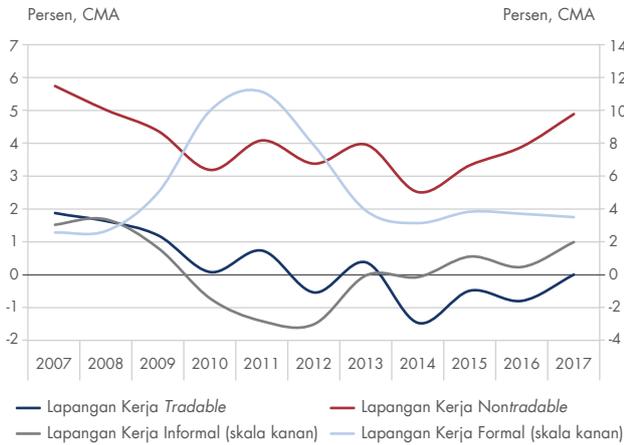
➔ **Grafik 2.19. Indikator Job Vacancy Online**



Sumber: Bank Indonesia

⁹ Indikator *job vacancy online* diolah dari Big Data Bank Indonesia.

➔ **Grafik 2.20. Sektor dan Jenis Lapangan Pekerjaan**

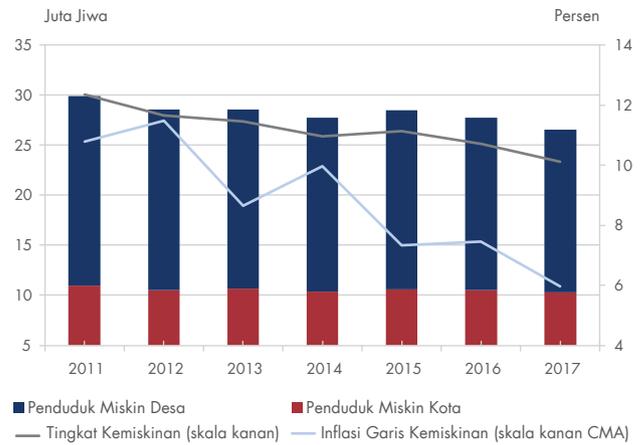


Sumber: BPS, diolah

Di tengah perbaikan indikator ketenagakerjaan tersebut, beberapa hal perlu tetap mendapatkan perhatian. Penurunan tingkat pengangguran yang terbatas dipengaruhi penciptaan lapangan kerja baru yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi pada 2017. Selain dipengaruhi proses konsolidasi internal di sejumlah korporasi, tantangan penurunan pengangguran juga terkait kesenjangan keahlian antara yang dibutuhkan dan ketersediaan tenaga kerja. Tantangan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya pengangguran di perkotaan pada 2017. Penyerapan tenaga kerja di perkotaan mengalami pergeseran ke lapangan pekerjaan berbasis teknologi seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Pemulihan ekonomi juga berdampak positif terhadap membaiknya beberapa indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,1% pada 2017, atau turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 10,7% (Grafik 2.21). Penurunan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh terjaganya inflasi pada level yang rendah, khususnya inflasi bahan pangan. Hal ini berdampak pada penurunan inflasi garis kemiskinan yang cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin di perkotaan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah di perdesaan. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam mengentaskan kemiskinan di perkotaan. Salah satu dari tantangan tersebut terkait dengan tren urbanisasi yang terindikasi semakin meningkat berdasarkan data sensus pada 2015. Urbanisasi didorong oleh terbatasnya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di desa. Di sisi lain, penciptaan lapangan pekerjaan di perkotaan

➔ **Grafik 2.21. Perkembangan Angka Kemiskinan**

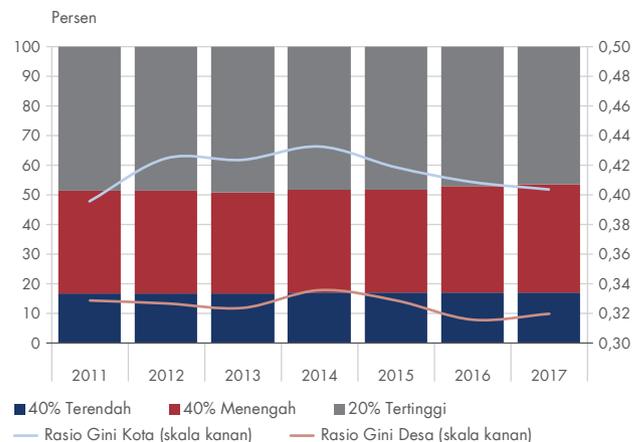


Sumber: BPS dan World Bank, diolah

terindikasi juga lebih lambat dari laju meningkatnya urbanisasi.

Kesejahteraan yang membaik juga tercermin pada penurunan kondisi ketimpangan. Hal ini tergambar pada angka rasio gini yang tercatat sebesar 0,391 pada September 2017, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka September 2016 yang sebesar 0,394 (Grafik 2.22). Meski demikian, perbaikan kondisi ketimpangan pada 2017 tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan pengeluaran pada kelompok masyarakat 20% persentil tertinggi. Berdasarkan lokasi, penurunan rasio gini terutama bersumber dari menurunnya ketimpangan di perkotaan, sedangkan ketimpangan di perdesaan sedikit meningkat.

➔ **Grafik 2.22. Rasio Gini dan Distribusi Ketimpangan**

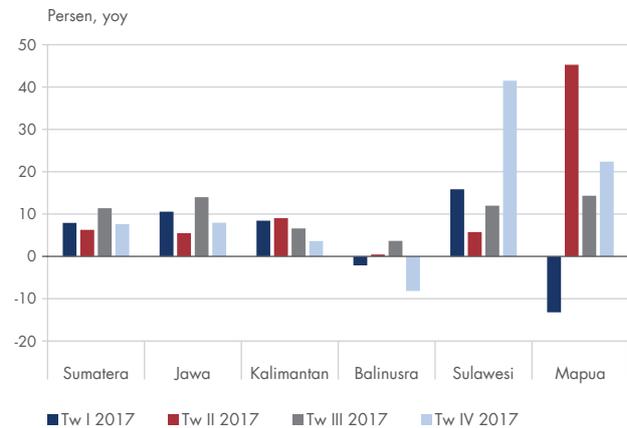


Sumber: BPS, diolah

2.4. DINAMIKA PEREKONOMIAN REGIONAL

Dinamika perekonomian antar wilayah di Indonesia dipengaruhi perkembangan harga komoditas dunia dan peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama tercatat di wilayah dengan perekonomian berbasis SDA (Gambar 2.1). Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang secara signifikan lebih tinggi dari tahun sebelumnya didorong membaiknya kinerja subLU perkebunan, khususnya dari ekspor komoditas CPO, serta subLU pertambangan dari ekspor batu bara. Pertumbuhan ekonomi Sumatera juga meningkat dipengaruhi perbaikan ekspor komoditas subLU perkebunan dan juga pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Jawa cukup stabil, dengan dukungan dari investasi di proyek infrastruktur. Pembangunan proyek infrastruktur yang cukup intensif, baik yang didanai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta, mendorong kinerja LU konstruksi. Perkembangan ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi di Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Sulawesi, serta Maluku dan Papua (Mapua) yang melambat. Perlambatan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh melemahnya kinerja subLU pertambangan migas, subLU pertambangan dan penggalian lainnya, serta subLU pertanian.¹⁰

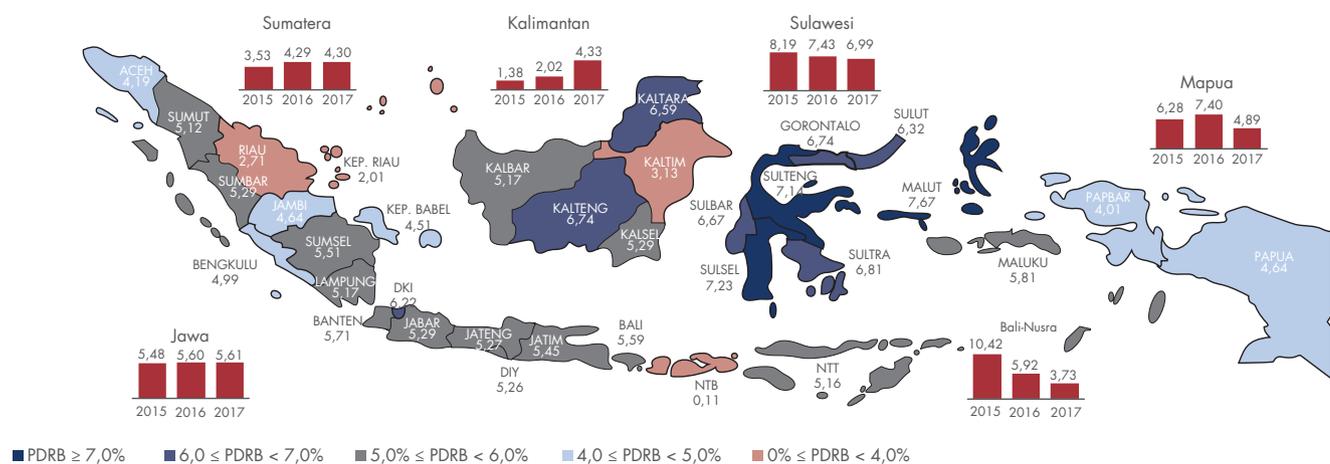
Grafik 2.23. Pertumbuhan Ekspor Menurut Wilayah



Sumber: BPS, diolah

Secara lebih rinci, pengaruh kenaikan harga komoditas perkebunan dan pertambangan terhadap perekonomian regional, tercermin pada kinerja perekonomian di luar Jawa. Peningkatan ekspor perkebunan khususnya CPO mendukung kinerja perekonomian Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (Grafik 2.23).¹¹ Produksi kelapa sawit di seluruh daerah produsen meningkat sejalan dengan kondusifnya iklim, sehingga mendukung peningkatan produksi CPO yang secara agregat mencapai 18% pada 2017. Hal ini khususnya tercermin dari kinerja ekonomi Sumatera dan Kalimantan pada paruh 2017. Dinamika

Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2017



Sumber: BPS, diolah

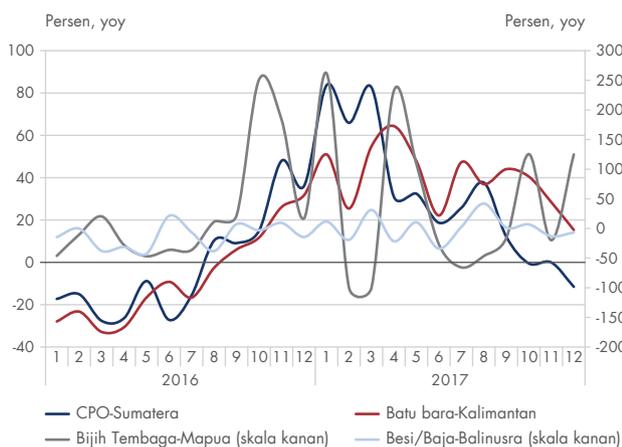
¹¹ Provinsi di Sumatera yang menjadi produsen terbesar CPO adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hampir seluruh provinsi di Kalimantan terkecuali Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luasan lahan kelapa sawit yang signifikan seperti halnya empat provinsi di Sumatera tersebut. Sementara, luasan lahan kelapa sawit di Sulawesi masih di bawah Sumatera dan Kalimantan.

¹⁰ SubLU pertambangan dan penggalian lainnya adalah subLU pertambangan nonmigas selain batu bara dan bijih logam.

perekonomian daerah di Sumatera dan Kalimantan juga dipengaruhi oleh kinerja ekspor pertambangan khususnya batu bara, yang memiliki pangsa ekspor besar. Namun, terdapat perbedaan dampak kenaikan harga batu bara ke perekonomian antarwilayah terutama karena perbedaan jenis kalori batu bara yang dihasilkan. Dengan cadangan batu bara yang hampir sama besar, permintaan batu bara dengan kalori tinggi yang merupakan hasil tambang di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur terlihat lebih kuat.¹² Kondisi ini memberikan dampak yang sangat positif pada kinerja ekonomi di kedua provinsi tersebut. Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tumbuh pada level tertinggi di Kalimantan yakni sebesar 6,74%. Kenaikan harga komoditas juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, yang kembali di level positif setelah dua tahun sebelumnya mengalami kontraksi.

Kenaikan harga komoditas juga berdampak positif kepada wilayah yang banyak dipengaruhi komoditas pertambangan, seperti di Sulawesi, Balinusra, dan Mapua. Perbaikan ekspor pertambangan mineral di ketiga wilayah tersebut terlihat lebih kuat pada paruh kedua 2017, meskipun kebijakan relaksasi ekspor konsentrat telah diimplementasikan sejak awal tahun 2017 (Grafik 2.24). Relaksasi ekspor konsentrat selama lima tahun bagi pemegang ijin usaha pertambangan yang sedang membangun *smelter*, turut menjadi salah satu faktor pendorong investasi pembangunan *smelter* nikel di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku

➔ **Grafik 2.24. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama Menurut Wilayah**



Sumber: Bank Indonesia

12 Produksi batu bara berkalori rendah terutama di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Utara. Di sisi lain, pengaruh ekspor pertambangan mulai melambat di Papua dan Balinusra pada paruh kedua 2017. Hal ini sebagai dampak dari gangguan produksi pada pertambangan bijih tembaga di Provinsi Papua dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kendala operasional terkait isu tenaga kerja serta penyesuaian atas perubahan regulasi ijin ekspor menjadi faktor yang menahan peningkatan produksi dan ekspor. Tertahannya perbaikan kinerja produksi bijih tembaga di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terkait dengan masih berlanjutnya proses konsolidasi korporasi pascamerger.

Pengaruh kenaikan harga komoditas migas belum cukup optimal mendukung perekonomian di sejumlah daerah. Meskipun menerima dampak positif dari peningkatan ekspor CPO dan batu bara, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur masih terbatas. Kedua provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah di wilayahnya. Kinerja ekonomi Provinsi Riau dan Kalimantan Timur tercatat tumbuh masing-masing sebesar 2,71% dan 3,13%. Capaian ini merupakan dampak dari penurunan *lifting* minyak yang signifikan, di tengah harga minyak dunia yang meningkat. Sumur minyak di kedua provinsi itu merupakan satu dari sebagian besar sumur penghasil minyak yang menurun produktivitasnya terkait dengan usia operasional.

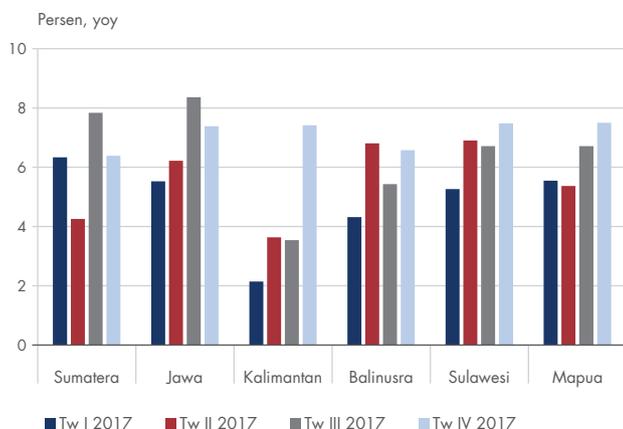
Pertumbuhan ekonomi Jawa pada 2017 tetap solid. Seluruh provinsi di Jawa mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta bahkan mencapai 6,22%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pertumbuhan pada 2016 sebesar 5,88%. Selain itu, tiga dari enam provinsi di Jawa mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari capaian 2016, dengan perbaikan ekonomi yang paling signifikan terjadi di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan perekonomian Jawa yang tetap solid pada gilirannya berkontribusi menopang pertumbuhan ekonomi nasional karena pangsa ekonomi Jawa yang mencapai 58,6% dari total perekonomian nasional.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja perekonomian daerah ialah pembangunan infrastruktur. Selain berdampak ke perekonomian Jawa, proyek infrastruktur juga menjadi penggerak perekonomian sebagian wilayah lain di luar Jawa. Percepatan sejumlah proyek infrastruktur di daerah, termasuk proyek strategis nasional (PSN) untuk memperluas konektivitas, ketersediaan energi, dan fasilitas infrastruktur

dasar, memberikan dampak positif ke peningkatan investasi bangunan di Sumatera, Jawa, dan wilayah timur Indonesia (Grafik 2.25). Sejumlah proyek fisik skala besar yang berjalan sepanjang 2017 ialah pembangunan jalan tol Trans Sumatera, infrastruktur pendukung pelaksanaan Asian Games 2018 di Provinsi Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Gencarnya pembangunan *light rail train* (LRT) dan fasilitas olah raga untuk mendukung Asian Games 2018 berpengaruh pada capaian pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 5,51%, tertinggi di antara seluruh provinsi di Sumatera. Sementara di Jawa, pembangunan proyek strategis meliputi bandar udara Kertajati di Provinsi Jawa Barat, *mass rapid transit* (MRT) di Provinsi DKI Jakarta dan *light rail train* (LRT) Jabodetabek, pembangkit listrik, dan jalan tol di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah. Keseluruhan proyek di Jawa tersebut membawa pertumbuhan investasi Jawa hingga 6,53%, tertinggi dalam lima tahun terakhir (Grafik 2.26). Sementara di wilayah timur Indonesia, pembangunan berskala besar difokuskan pada pembangunan Trans Sulawesi, Trans Papua, serta infrastruktur pendukung tol laut.

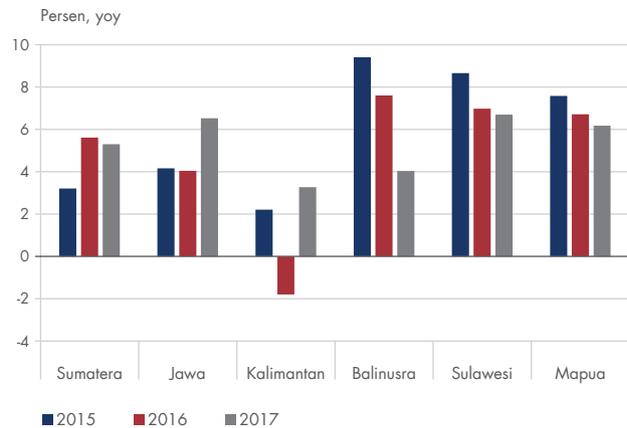
Perkembangan positif harga komoditas dan proyek infrastruktur pemerintah selanjutnya mendorong perkembangan investasi nonbangunan di beberapa wilayah. Pengaruh komoditas terhadap investasi nonbangunan terutama terlihat di Sulawesi dan Mapua, yang tercatat tumbuh tinggi masing-masing sebesar 6,70% dan 6,18%. Investasi nonbangunan tersebut didorong oleh penggantian alat angkut operasional serta

➔ **Grafik 2.25. Investasi Bangunan Menurut Wilayah**



Sumber: BPS, diolah

➔ **Grafik 2.26. Investasi Menurut Wilayah**

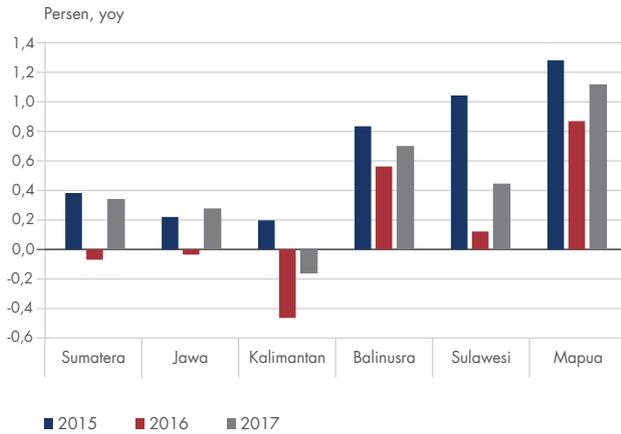


Sumber: BPS, diolah

pembelian mesin dan alat untuk industri pertambangan. Perkembangan investasi nonbangunan pada industri berbasis SDA di antaranya juga didorong pembangunan *smelter* di wilayah timur Indonesia serta industri pengolahan kelapa sawit di Sumatera. Di Jawa, investasi nonbangunan pada industri pengolahan sebagian besar masih berupa penggantian sejumlah suku cadang mesin dan peralatan, meskipun terdapat investasi yang cukup dominan di industri alat angkut karena adanya pembangunan pabrik baru yang dilakukan investor Jepang dan Tiongkok. Proyek infrastruktur juga mendorong kinerja investasi nonbangunan di Jawa maupun luar Jawa yang direalisasikan dengan pembelian alat konstruksi, mesin, dan sejumlah peralatan listrik. Hal tersebut terkonfirmasi dari penyelesaian proyek pembangkit listrik 500 MW pada 2017, yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan peningkatan kualitas belanja dan percepatan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk memberikan stimulus bagi kinerja ekonomi daerah. Selain stimulus melalui belanja modal untuk investasi, stimulus fiskal daerah juga dilakukan melalui konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah tumbuh meningkat di seluruh wilayah, kecuali Kalimantan (Grafik 2.27). Langkah pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) turut mendukung percepatan belanja di daerah. Alokasi dana desa yang jauh lebih tinggi pada 2017 yakni Rp60 triliun, dari alokasi pada 2016 sebesar Rp47 triliun

➔ **Grafik 2.27. Kontribusi Konsumsi Pemerintah Menurut Wilayah**

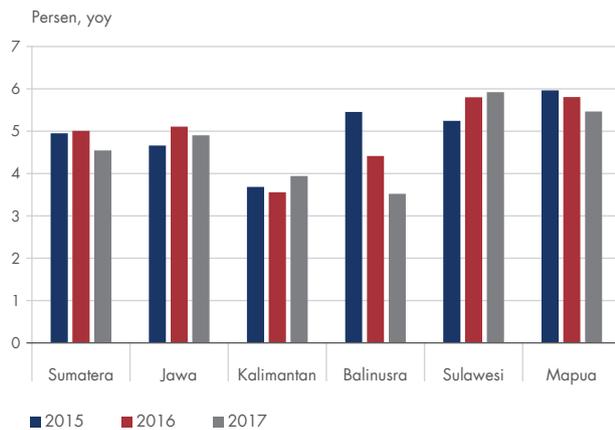


Sumber: BPS, diolah

mampu memberikan stimulan ke aktivitas perekonomian daerah. Realisasi TKDD 2017 mencapai Rp742 triliun atau meningkat 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun serapan realisasi belanja Kementerian/Lembaga di daerah pada 2017 mencapai sekitar 91% yang juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 85,5%.¹³

Dinamika konsumsi rumah tangga antar wilayah juga tidak terlepas dari pengaruh kinerja produksi komoditas sumber daya alam. Perbaikan konsumsi rumah tangga tercatat kuat di Kalimantan dan Sulawesi dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas CPO, batu bara, dan komoditas tambang lainnya (Grafik 2.28). Namun demikian, perbaikan konsumsi rumah tangga terlihat belum merata di seluruh wilayah berbasis SDA. Hal ini

➔ **Grafik 2.28. Konsumsi Rumah Tangga Menurut Wilayah**



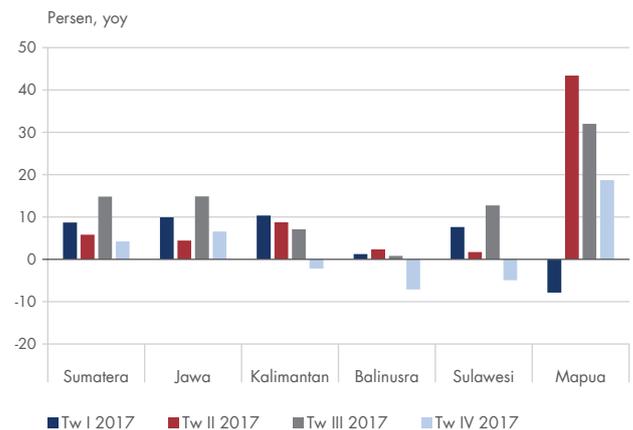
Sumber: BPS, diolah

13 Realisasi berdasarkan data Kementerian Keuangan per 15 Januari 2018.

terkait dengan dampak penciptaan lapangan kerja yang masih terbatas. Penerimaan ekspor yang meningkat terindikasi masih digunakan korporasi untuk peremajaan alat produksi. Turunnya jumlah pekerja di sektor primer juga terkait dengan terbatasnya perluasan lahan pertanian, yang kemudian menahan penciptaan lapangan kerja. Perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga di Jawa yang memiliki pangsa terbesar juga tertahan, antara lain terkait dampak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang lebih rendah pascaperubahan formulasi pengupahan. Selain Jawa, terbatasnya dampak kenaikan UMP terhadap konsumsi rumah tangga juga terjadi di Sumatera yang merupakan basis industri. Kenaikan UMP pada 2017 ditetapkan sebesar 8,25%, lebih rendah dari penyesuaian UMP pada 2016 yang melebihi 10%.¹⁴ Selain itu, menurunnya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) turut menjadi faktor yang menahan pendapatan dan konsumsi di sejumlah daerah khususnya di Jawa.

Secara keseluruhan, kenaikan permintaan domestik dan kenaikan kebutuhan untuk mendorong ekspor berdampak pada dinamika impor di berbagai wilayah. Impor cukup kuat terlihat di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Mapua (Grafik 2.29). Pembelian alat angkut untuk mendukung operasional usaha perkebunan dan pertambangan di luar

➔ **Grafik 2.29. Pertumbuhan Impor Menurut Wilayah**



Sumber: BPS, diolah

14 Upah minimum provinsi (UMP) tahun 2017 secara nasional mengalami kenaikan di atas 9,3%. SK Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan bahwa minimum kenaikan UMP 2017 ditetapkan 8,25% (inflasi September 3,07% + PDB triwulan II 2016 5,18%). Terdapat 6 provinsi, yaitu Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang menaikkan UMP di bawah 8,25%. Pada 2016, keenam provinsi tersebut telah memiliki persentase UMP terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) lebih dari 100%. Sementara terdapat 8 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat menaikkan UMP lebih dari sama dengan 8,25% dan memiliki persentase UMP terhadap KHL kurang dari 100% pada 2016.

Jawa berimplikasi pada kenaikan impor barang modal. Sejalan dengan itu, beberapa korporasi berbasis SDA di Sumatera dan Sulawesi juga meningkatkan kapasitas pengolahan CPO dan hasil perikanan. Sebagian dari impor terkait industri pengolahan juga meningkat di Sulawesi khususnya impor biji gandum sebagai bahan dasar pengolahan tepung terigu. Sementara di Mapua, peningkatan impor terkait dengan pembangunan infrastruktur terutama besi baja. Penyelesaian proyek kelistrikan di Sumatera, Kalimantan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendorong peningkatan impor mesin dan perlengkapan. Adapun peningkatan impor barang modal di Jawa terutama pada paruh kedua 2017 terkait dengan investasi di industri alat angkutan, tekstil, dan produk turunannya.

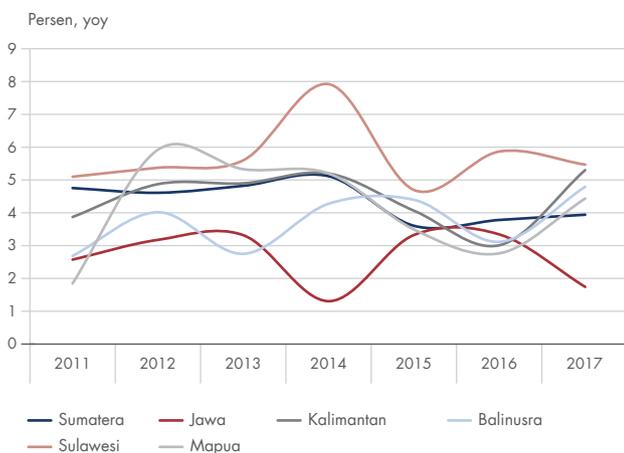
Pengaruh kenaikan harga komoditas dunia dan peran pemerintah dalam proyek infrastruktur juga tercermin dari kinerja dan dinamika lapangan usaha (LU) antar wilayah. Dinamika 2017 menunjukkan LU *tradable* menjadi penopang utama perekonomian di luar Jawa, khususnya Sumatera dan Kalimantan. Pangsa LU *tradable* di Sumatera dan Kalimantan tercatat lebih dari setengah dari total PDRB, bahkan pangsa di Kalimantan mencapai 61% dari total PDRB. Hal ini menyebabkan dampak dari perbaikan di LU pertanian, kehutanan, dan perikanan serta LU pertambangan dan penggalian sangat positif ke perekonomian kedua wilayah tersebut.

Lebih rinci, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan di Sumatera dan Kalimantan masing-masing tumbuh sebesar 3,93% dan 5,30% (Grafik 2.30). Produksi kelapa sawit

yang menjadi faktor pendorong ekspor di kedua wilayah tersebut, meningkat pada kisaran 5%-8%. Terkait dengan pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi terjadi secara merata di seluruh wilayah. Peningkatan produksi padi di Sulawesi, Mapua, serta Balinusra tercatat 6%, tertinggi dibandingkan dengan produksi wilayah lainnya. Adapun di Jawa, peningkatan produksi padi hanya sebesar 3% sejalan dengan terbatasnya ekspansi luas lahan.

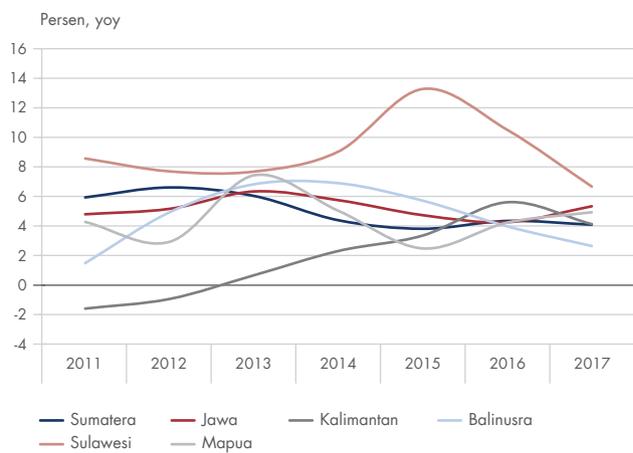
LU industri pengolahan yang memiliki pangsa terbesar di Jawa meningkat signifikan. Pertumbuhan LU industri pengolahan di Jawa meningkat dari 4,28% pada 2016 menjadi 5,36% pada 2017 (Grafik 2.31). Hal ini ditopang oleh meningkatnya kinerja pada industri tekstil dan pakaian jadi, kimia dasar, dan farmasi yang sebagian ditujukan untuk pemenuhan ekspor. Sementara industri alat angkut juga menopang kinerja manufaktur di Jawa, meskipun tumbuh lebih terbatas. Perbaikan kinerja LU industri pengolahan juga terjadi di Mapua terutama produksi industri pengolahan nikel di Provinsi Maluku Utara, seiring dengan kembali diizinkan ekspor konsentrat berkadar rendah. Meski demikian, produksi industri pengolahan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi faktor yang memengaruhi perlambatan kinerja LU industri pengolahan di Sulawesi. Kinerja industri pengolahan hasil tambang di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menurun sebagai dampak dari berlangsungnya konsolidasi korporasi. Adapun kinerja LU industri pengolahan di Sumatera dan Kalimantan yang memiliki pangsa cukup dominan mengalami penurunan sejalan dengan terbatasnya produksi di industri migas.

➔ **Grafik 2.30.** Pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



Sumber: BPS, diolah

➔ **Grafik 2.31.** Pertumbuhan LU Industri Pengolahan



Sumber: BPS, diolah

Pembangunan proyek infrastruktur berdampak positif pada kinerja LU konstruksi di berbagai wilayah terutama Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (Grafik 2.32). Jawa yang memiliki proyek infrastruktur terbanyak mencatatkan peningkatan pertumbuhan dari 4,12% pada 2016 menjadi 6,51% pada 2017. Akselerasi pembangunan proyek infrastruktur di Jawa tidak hanya terkait dengan jaringan konektivitas antar daerah melalui darat (tol Trans Jawa), namun juga proyek pelabuhan udara (Kertajati di Provinsi Jawa Barat dan Kulonprogo di Provinsi Yogyakarta) dan laut (New Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta). Pembangunan jaringan transportasi publik perkotaan juga mendukung peningkatan kinerja LU konstruksi di Jawa. Demikian pula dengan Kalimantan dan Sulawesi dengan pembangunan dalam skala besar yang terfokus pada proyek tol darat dan laut serta beberapa kawasan industri turut mendorong pertumbuhan LU konstruksi.

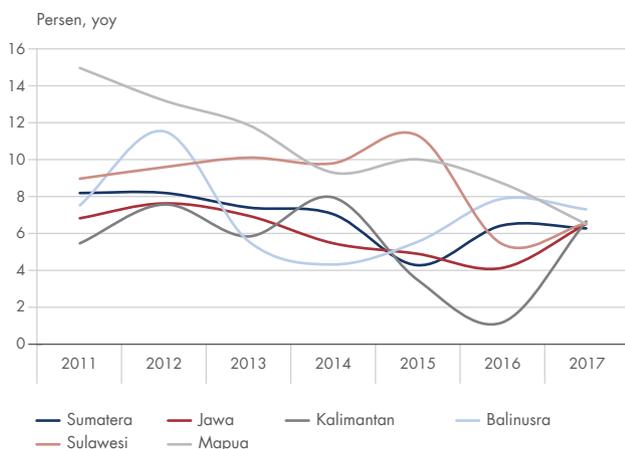
LU konstruksi mengalami perlambatan di Sumatera, Balinusra, dan Mapua, meskipun masih tumbuh tinggi di atas 6%. Adapun perlambatan yang terjadi di ketiga wilayah ini lebih terkait dengan pembangunan proyek infrastruktur skala besar yang telah memasuki penyelesaian. Moderasi sejumlah harga komoditas SDA turut menahan minat investasi bangunan di Mapua. Sementara itu, erupsi Gunung Agung menyebabkan terhambatnya sebagian proyek konstruksi swasta di Provinsi Bali.

Pengaruh perbaikan kinerja LU *tradable* kepada kinerja LU *nontradable* antarwilayah terlihat beragam. Aktivitas perdagangan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan membaik lebih ditopang oleh meningkatnya ekspor. Sementara di Sulawesi dan wilayah timur Indonesia, pertumbuhan subLU

perdagangan cenderung tertahan dipengaruhi terbatasnya perdagangan domestik. Kenaikan kinerja LU perdagangan di sejumlah wilayah juga dipengaruhi aktivitas pariwisata. Dampak positif terlihat pada kinerja subLU penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang masih cukup tinggi di sebagian wilayah tersebut. Perekonomian di daerah yang memiliki sentra pariwisata seperti di Jawa, Sulawesi, Mapua, dan Balinusra, tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kinerja pada 2016. Kinerja pariwisata di Balinusra bahkan masih mampu tumbuh lebih tinggi, di tengah erupsi Gunung Agung di Bali pada paruh akhir 2017.

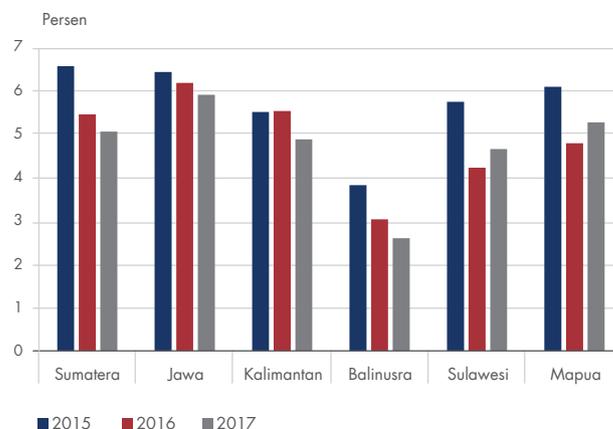
Perbaikan kinerja ekspor dan perkembangan pariwisata di beberapa daerah, memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan. Peningkatan ekspor terindikasi mampu mendukung serapan tenaga kerja di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah berbasis SDA. Serapan tenaga kerja yang lebih kuat terindikasi di Sumatera dan Kalimantan, tercermin dari penurunan tingkat pengangguran terbuka yang signifikan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera, khususnya di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sementara di Kalimantan terutama di Provinsi Kalimantan Timur (Grafik 2.33). Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera dan Kalimantan masing-masing turun menjadi 5,04% dan 4,86% pada 2017, dari tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 5,43% dan 5,51%. Perkembangan pariwisata dan peralihan ke pola konsumsi *leisure* turut mendorong pembukaan lapangan kerja di LU perdagangan dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal tersebut tercermin dari penurunan tingkat pengangguran terbuka di Balinusra sebagai wilayah tujuan utama wisatawan

➔ **Grafik 2.32. Pertumbuhan LU Konstruksi**



Sumber: BPS, diolah

➔ **Grafik 2.33. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Wilayah**



Sumber: BPS, diolah
Keterangan: *Data posisi Agustus di masing-masing periode

mancanegara. Tingkat pengangguran terbuka di Balinusra tercatat sebesar 2,59%, terendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di wilayah lainnya.

Perkembangan positif ketenagakerjaan juga dipengaruhi kinerja LU industri pengolahan khususnya di Jawa. Dukungan pada industri padat karya, seperti industri elektronik, serta industri makanan dan minuman, berdampak positif pada penambahan lapangan kerja. Perbaikan penyerapan tenaga kerja pada LU industri pengolahan terlihat di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pembangunan beberapa kawasan industri turut menopang perbaikan penyerapan tenaga kerja di luar Jawa. Beberapa kawasan industri yang mulai beroperasi di luar Jawa, seperti Kawasan Industri Morowali Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Bantaeng Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Konawe Sulawesi Tenggara, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Nusa Tenggara Barat, mendukung perluasan lapangan kerja pada 2017. Sebagai bagian dari program strategis pemerintah, kawasan-kawasan industri di luar Jawa tersebut tidak hanya dilengkapi dengan jaringan infrastruktur fisik, namun juga terintegrasi dengan pusat pendidikan vokasi. Hal ini mendukung perbaikan penyerapan tenaga kerja setempat yang telah disiapkan melalui pendidikan vokasi.

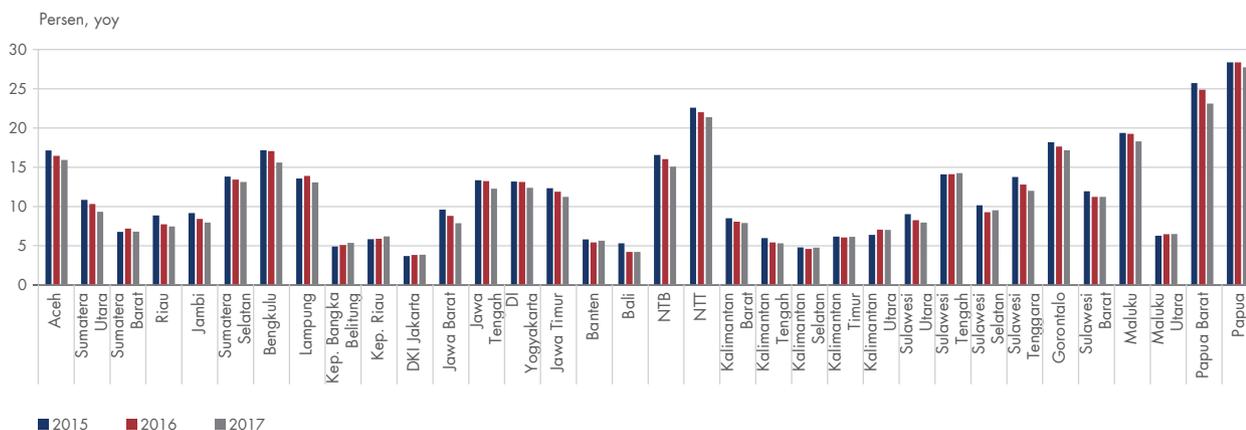
Pembangunan infrastruktur juga membuka lapangan kerja di daerah yang memiliki proyek infrastruktur skala besar seperti Jawa. Namun, peningkatan tenaga kerja konstruksi relatif moderat dengan semakin meningkatnya mekanisasi khususnya untuk proyek transportasi publik

perkotaan. Inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi melalui peningkatan jaringan konektivitas juga memainkan peranan penting dalam perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Dibukanya jalur penerbangan internasional langsung untuk mendukung sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara turut membantu terbukanya lapangan pekerjaan baru. Hal ini memberikan dampak positif dalam menahan peningkatan tingkat pengangguran di provinsi tersebut.

Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja di subLU pertambangan migas dan mineral lebih rendah pada 2017. Rasionalisasi jumlah tenaga kerja pada korporasi pertambangan di Papua memberikan dampak yang cukup signifikan pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Langkah rasionalisasi tersebut diambil oleh korporasi dalam penyesuaian terhadap kebijakan izin usaha pertambangan. yang berimbas pada ketidakpastian investasi maupun produksi.

Kemiskinan juga tercatat menurun di sebagian besar wilayah seiring dengan inflasi yang terkendali dan pembangunan yang lebih merata (Grafik 2.34). Penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak terlepas dari kenaikan garis kemiskinan yang moderat dengan relatif rendahnya inflasi *volatile foods*. Kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata melalui perbaikan infrastruktur, akses konektivitas, dan perluasan bantuan sosial mulai memperlihatkan dampak positif terhadap perbaikan kesejahteraan. Persentase penduduk miskin di Mapua menurun dalam dua tahun terakhir. Meskipun masih

➔ **Grafik 2.34. Persentase Penduduk Miskin**



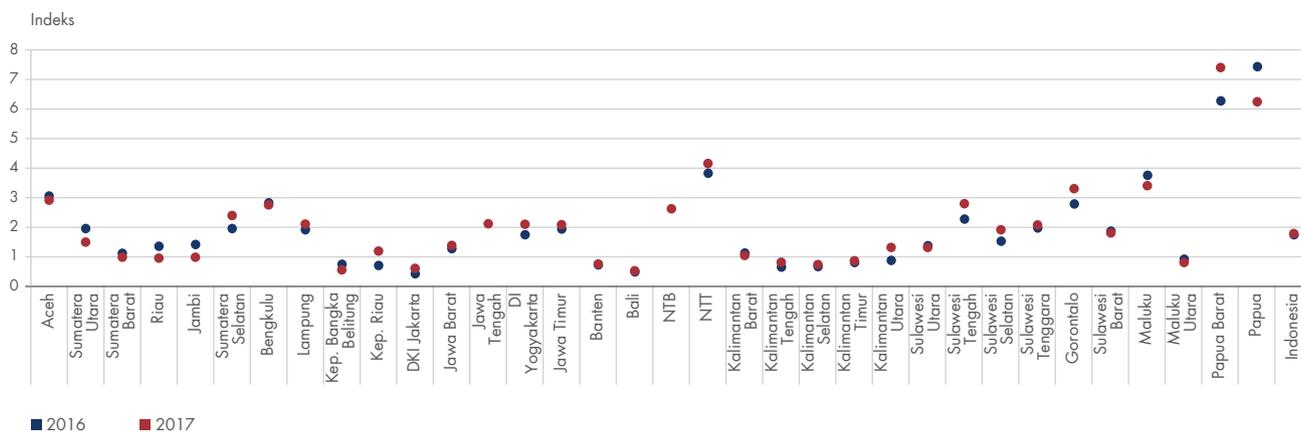
Sumber: BPS, diolah
Keterangan: *Data posisi September di masing-masing periode

mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan kondisi wilayah lainnya, distribusi bahan pangan di Mapua telah didukung dengan peningkatan akses konektivitas khususnya konektivitas maritim. Persentase penduduk miskin di Mapua turun dari 22,0% pada 2016 menjadi 21,2% pada 2017. Penurunan persentase penduduk miskin di Sumatera dan Kalimantan juga dipengaruhi oleh perbaikan konektivitas yang secara konsisten dilakukan. Sementara itu, penurunan penduduk miskin di Jawa tak lepas dari perluasan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan membaik di sebagian wilayah, sebagai pengaruh terkendalnya harga kebutuhan bahan pangan yang terkendali. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang cukup dalam terjadi di sebagian daerah di Sumatera dan Mapua (Grafik 2.35).¹⁵ Sementara indeks kedalaman kemiskinan di sebagian daerah di Jawa khususnya di daerah perkotaan seperti Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan. Hal ini merupakan cerminan dari kondisi masyarakat miskin perkotaan yang memiliki tingkat pengeluaran jauh di bawah standar hidup layak. Faktor urbanisasi turut berperan dalam mendorong kondisi kemiskinan di perkotaan yang masih tinggi. Urbanisasi memberikan tekanan permintaan yang mendorong kenaikan harga, serta juga memberikan tekanan pada penyediaan lapangan kerja dengan upah memadai.

Perbaikan kesejahteraan juga terlihat pada kondisi ketimpangan pengeluaran di sebagian daerah yang menurun secara moderat (Grafik 2.36). Komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih merata khususnya di wilayah timur Indonesia, diperkirakan turut berdampak pada penurunan rasio gini di Mapua. Rasio gini di beberapa daerah di wilayah timur Indonesia yang berada di atas 0,40 pada 2015, telah turun menjadi di bawah rata-rata rasio gini nasional. Rasio gini Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat masing-masing turun menjadi 0,321 dan 0,387 pada 2017. Meskipun demikian, penurunan tingkat ketimpangan cenderung tidak merata. Daerah dengan basis perkotaan dominan seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur memiliki rasio gini yang tinggi di atas 0,40. Tingkat ketimpangan di ketiga daerah tersebut semakin melebar dalam tiga tahun terakhir. Ketimpangan di Jawa tertinggi dibandingkan dengan kondisi wilayah lain, sejalan dengan perbedaan tingkat pendapatan dan jenis lapangan pekerjaan yang signifikan. Sebagian besar daerah di Sulawesi mengalami pelebaran tingkat ketimpangan, yang bahkan lebih tinggi dari kondisi di Mapua yang secara historis memiliki masalah struktural dengan ketimpangan.

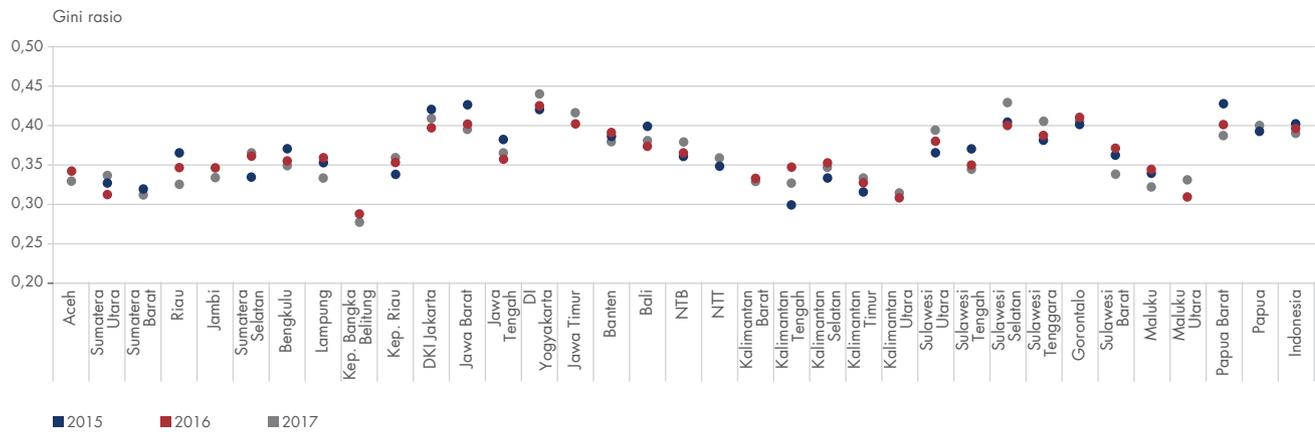
➔ **Grafik 2.35. Indeks Kedalaman Kemiskinan**



Sumber: BPS, diolah
Keterangan: *Data posisi September di masing-masing periode

15 Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

➔ **Grafik 2.36. Rasio Gini**



Sumber: BPS, diolah
 Keterangan: *Data posisi September di masing-masing periode

Boks 2.1.

Konsumsi Rumah Tangga dan Dinamika Pendapatan

Peran konsumsi rumah tangga terhadap PDB menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring dengan melambatnya perbaikan konsumsi rumah tangga pascakrisis finansial global 2008-2009 di tengah pemulihan PDB per kapita yang berlangsung relatif cepat (*V-shaped recovery*). Lambatnya perbaikan konsumsi rumah tangga dibandingkan perbaikan PDB per kapita disebabkan perbaikan PDB per kapita yang lebih didorong oleh perbaikan kinerja ekspor komoditas sumber daya alam. Meningkatnya kinerja ekspor SDA tersebut seiring dengan tingginya permintaan terhadap komoditas SDA khususnya dari Tiongkok. Kondisi tersebut berdampak pada relatif lebih tingginya pertumbuhan investasi di sektor SDA dibandingkan investasi di sektor manufaktur yang menjadi tumpuan penciptaan lapangan kerja.

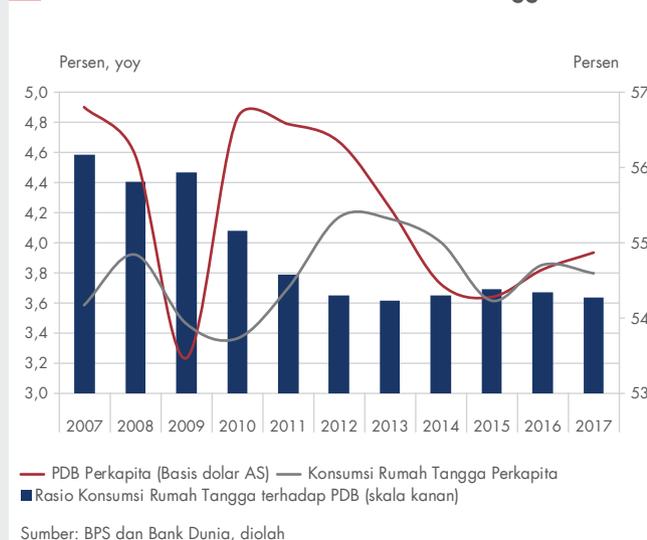
Pada 2016, PDB per kapita kembali membaik diikuti dengan perbaikan konsumsi rumah tangga. Membaiknya konsumsi rumah tangga tersebut tidak terlepas dari dukungan belanja pemerintah khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan

konsumsi rumah tangga kembali terbatas pada 2017 meskipun PDB per kapita terus membaik (Grafik 1). Konsumsi rumah tangga melemah di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi yang didukung oleh perbaikan ekspor dan investasi. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor dari sisi domestik, di antaranya pelemahan di pasar tenaga kerja dan penyesuaian konsumsi akibat konsolidasi korporasi, perilaku menahan konsumsi, dan penyesuaian terhadap pendapatan.

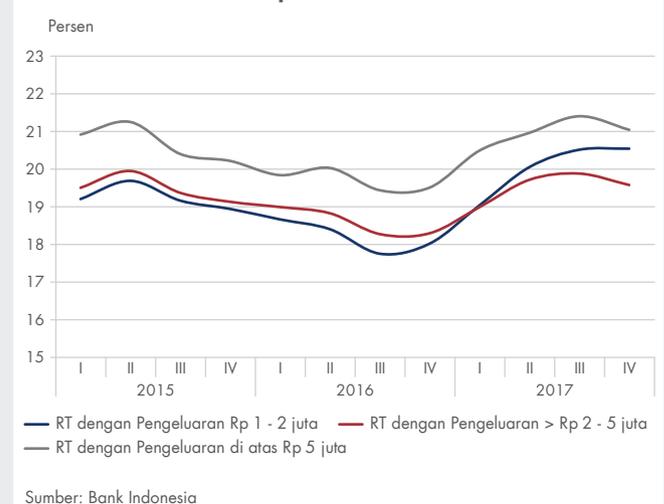
Konsolidasi yang dilakukan korporasi berdampak pada melemahnya pasar tenaga kerja. Seiring dengan berakhirnya *boom* komoditas SDA, sejumlah korporasi di sektor pertambangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kemudian berdampak pada turunnya pendapatan rumah tangga. Hal ini khususnya terjadi di wilayah yang menjadi basis kegiatan pertambangan seperti Kalimantan dan Sumatera. Konsolidasi yang dilakukan korporasi juga menyebabkan tertahannya ekspansi usaha, terjadinya penyesuaian upah, dan terbatasnya pembukaan lapangan kerja baru. Hal tersebut secara tidak langsung turut berdampak pada ekspansi sektor ekonomi lain seperti manufaktur dan jasa.

Seiring konsolidasi yang dilakukan korporasi, rumah tangga juga melakukan penyesuaian konsumsi dengan membatasi konsumsi dan meningkatkan simpanan sebagai langkah antisipatif. Hal ini tercermin dari meningkatnya porsi pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk simpanan (Grafik 2). Respons tersebut terutama diambil oleh kelompok rumah tangga dengan jumlah tabungan kecil (1-2 juta). Sementara itu, porsi simpanan pada

➔ **Grafik 1. Dinamika Konsumsi Rumah Tangga**



➔ **Grafik 2. Alokasi Pendapatan Rumah Tangga untuk Simpanan**



kelompok rumah tangga dengan jumlah yang lebih besar cenderung dipengaruhi oleh faktor sentimen sebagai dampak dinamika sosio-politik. Faktor sentimen tersebut kemudian berdampak pada perilaku menahan konsumsi dan memperbesar simpanan.

Perubahan pola konsumsi rumah tangga juga terkait dengan penyesuaian terhadap pendapatan. Hal ini terutama dilakukan oleh rumah tangga yang bergantung pada jenis lapangan kerja bebas. Kelompok rumah tangga ini sebagian besar berada pada sektor informal dan memiliki pendapatan yang cenderung fluktuatif. Pada 2017, kelompok rumah tangga tersebut bahkan mengalami penurunan pendapatan riil (Grafik 3). Secara teori, pola konsumsi rumah tangga didasarkan atas pendapatan tetap (*permanent income*). Akibatnya, rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap akan melakukan penyesuaian konsumsinya.

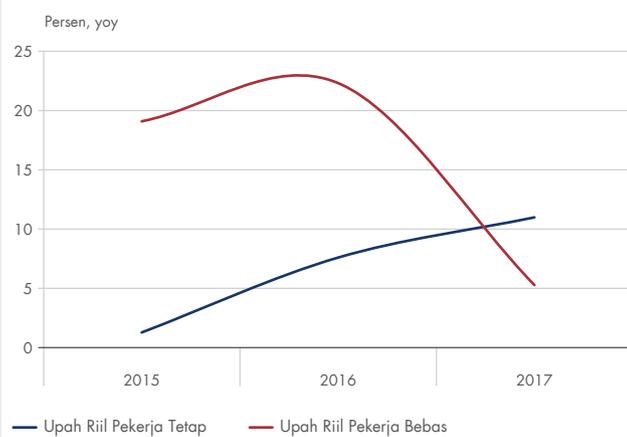
Penyesuaian konsumsi juga bersumber dari kelompok rumah tangga dengan pendapatan setara upah minimum. Pada 2016, Pemerintah mengeluarkan kebijakan reformulasi upah minimum dengan rumus baru perhitungan upah minimum yaitu pertumbuhan PDB ditambah inflasi tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada terbatasnya kenaikan upah minimum di kisaran 9%, jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di level dua digit (Grafik 4). Perubahan ini turut menjadi faktor yang mendorong penyesuaian konsumsi rumah tangga.

Fenomena perlambatan konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari kondisi pasar tenaga kerja domestik yang cenderung lebih longgar untuk tingkat keahlian rendah (*unskilled*). Banyaknya *unskilled labor* juga berisiko pada terjadinya *mismatch* di pasar tenaga kerja terutama di masa pemulihan perekonomian yang umumnya turut diwarnai dengan transformasi struktur ekonomi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan formal di tingkat menengah dan tinggi. Selain itu, perlu dirumuskan program magang yang dapat mendukung kesiapan tenaga kerja dan program pelatihan kewirausahaan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor alternatif seperti industri kreatif, teknologi, dan pariwisata.

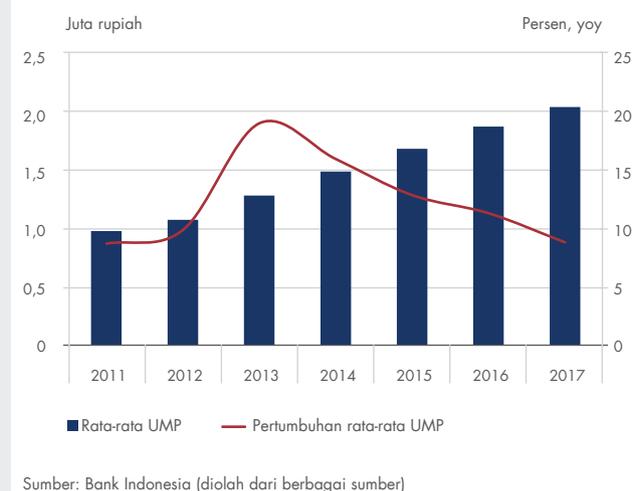
Dalam jangka pendek, perlu dukungan terhadap konsumsi rumah tangga khususnya pada kelompok menengah-bawah yang dapat dilakukan antara lain melalui program bansos tepat sasaran seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Selain memberi dukungan langsung ke konsumsi rumah tangga, PKH juga terbukti bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikonfirmasi oleh studi Bank Dunia tentang efektivitas PKH¹.

➔ **Grafik 3. Upah Riil**



Sumber: Sakernas, diolah

➔ **Grafik 4. Upah Minimum**



Sumber: Bank Indonesia (diolah dari berbagai sumber)

¹ Alatas, V. et al. (2011). Program Keluarga Harapan: Main Findings from the Impact Evaluation of Indonesia's Pilot Household Conditional Cash Transfer Program. *World Bank Working Paper No. 72506*



